

Katalog: 3205008.33

DATA DAN INFORMASI **KEMISKINAN** JAWA TENGAH 2012-2016



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA TENGAH**

DATA DAN INFORMASI
KEMISKINAN
JAWA TENGAH 2012-2016



DATA DAN INFORMASI KEMISKINAN JAWA TENGAH 2012-2016

ISSN : 2407-3369
No. Publikasi : 33520.1802
Katalog : 3205008.33

Ukuran Buku : 18,2 cm x 25,7 cm
Jumlah Halaman : x + 72 halaman

Naskah:

Bidang Statistik Sosial

Penyunting:

Bidang Statistik Sosial

Gambar Kulit:

Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Diterbitkan oleh:

© Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Dicetak oleh:

CV. Pelita

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

KATA PENGANTAR

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang dihadapi oleh negara-negara berkembang di dunia. Di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah, persoalan yang sama juga menjadi fokus perhatian pemerintah dan masyarakat. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Badan Pusat Statistik setiap tahunnya berusaha menyajikan data dan informasi kemiskinan berdasarkan hasil survei.

Publikasi ini berisi tentang data dan informasi mengenai kemiskinan dan indikator serta variabel lain yang terkait dengan masalah kemiskinan untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Untuk tingkat provinsi merupakan hasil penghitungan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Triwulan I dan Triwulan III. Sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota merupakan hasil penghitungan Susenas Triwulan I – IV (tahun 2012-2014) dan Susenas Maret tahun 2015-2016.

Diharapkan publikasi ini dapat memberikan informasi yang memadai bagi semua pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Semoga publikasi ini bermanfaat.

Semarang, April 2018
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Jawa Tengah



Dr. Margo Yuwono, S.Si, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Tujuan Penulisan	4
1.3. Ruang Lingkup dan Data yang Digunakan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II KONDISI KEMISKINAN DI JAWA TENGAH	5
2.1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan	5
2.2. Indeks Kedalaman Kemiskinan	8
2.3. Indeks Keparahan Kemiskinan	9
2.4. Karakteristik Penduduk Miskin.....	10
2.4.1. Karakteristik Pendidikan	10
2.4.2. Karakteristik Ketenagakerjaan	12
2.4.3. Pengeluaran per Kapita per Bulan.....	14
2.4.5. Karakteristik Perumahan.....	15
2.5. Program Penanggulangan Kemiskinan.....	17
BAB III PENUTUP	19
DAFTAR PUSTAKA	21
LAMPIRAN TABEL	23
CATATAN TEKNIS.....	64

DAFTAR LAMPIRAN TABEL

	Halaman
Tabel 1	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin menurut Wilayah, September 2012 – September 2016 25
Tabel 2	Jumlah dan Distribusi Persentase Penduduk Miskin menurut Wilayah, September 2012 – September 2016 25
Tabel 3	Garis Kemiskinan menurut Wilayah, September 2012 – September 2016 (Rupiah/Kapita/Bulan) 26
Tabel 4	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menurut Wilayah, September 2012 – September 2016 26
Tabel 5	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dan Garis Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota, September 2012 27
Tabel 6	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dan Garis Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota, September 2013 ¹⁾ 28
Tabel 7	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dan Garis Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota, September 2014 29
Tabel 8	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dan Garis Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota, Maret 2015 30
Tabel 9	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dan Garis Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota, Maret 2016 ... 31
Tabel 10	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, September 2012 32
Tabel 11	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, September 2013 33

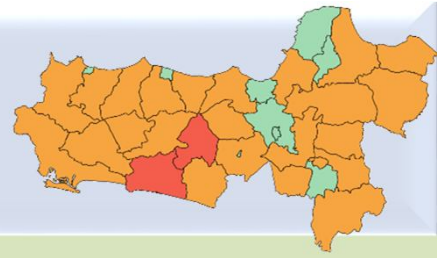
	Halaman
Tabel 12	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, September 2014 34
Tabel 13	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Maret 2015 35
Tabel 14	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Maret 2016 36
Tabel 15	Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota dan Golongan Umur, September 2012 37
Tabel 16	Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota dan Golongan Umur, September 2013 38
Tabel 17	Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota dan Golongan Umur, September 2014 39
Tabel 18	Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota dan Golongan Umur, Maret 2015 40
Tabel 19	Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota dan Golongan Umur, Maret 2016 41
Tabel 20	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Sektor Bekerja, September 2012 42
Tabel 21	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Sektor Bekerja, September 2013 43
Tabel 22	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Sektor Bekerja, September 2014 44
Tabel 23	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Sektor Bekerja, Maret 2015 45
Tabel 24	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Sektor Bekerja, Maret 2016 46
Tabel 25	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Status Bekerja, September 2012 47
Tabel 26	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Status Bekerja, September 2013 48

	Halaman
Tabel 27	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Status Bekerja, September 2014 49
Tabel 28	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Status Bekerja, Maret 2015 50
Tabel 29	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Status Bekerja, Maret 2016 51
Tabel 30	Persentase Pengeluaran per Kapita per Bulan Rumah Tangga Miskin untuk Komoditi Makanan menurut Kabupaten/Kota, September 2012-Maret 2016 52
Tabel 31	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Jamban Sendiri/Bersama menurut Kabupaten/Kota dan Status Miskin, September 2012 53
Tabel 32	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Jamban Sendiri/Bersama menurut Kabupaten/Kota dan Status Miskin, September 2013 54
Tabel 33	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Jamban Sendiri/Bersama menurut Kabupaten/Kota dan Status Miskin, September 2014 55
Tabel 34	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Jamban Sendiri/Bersama menurut Kabupaten/Kota dan Status Miskin, Maret 2015 56
Tabel 35	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Jamban Sendiri/Bersama menurut Kabupaten/Kota dan Status Miskin, Maret 2016 57
Tabel 36	Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Kabupaten/Kota dan Luas Lantai Perkapita, September 2012 58
Tabel 37	Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Kabupaten/Kota dan Luas Lantai Perkapita, September 2013 59
Tabel 38	Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Kabupaten/Kota dan Luas Lantai Perkapita, September 2014 60
Tabel 39	Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Kabupaten/Kota dan Luas Lantai Perkapita, Maret 2015 61
Tabel 40	Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Kabupaten/Kota dan Luas Lantai Perkapita, Maret 2016 62
Tabel 41	Persentase Rumah Tangga Miskin yang Pernah Membeli Beras Raskin, Rata-Rata Jumlah Beras Raskin dan Harga yang Dibeli oleh Rumah Tangga, Maret 2016 63

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1	Perkembangan Garis Kemiskinan menurut Daerah, September 2012 - September 2016 5
Gambar 2	Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, September 2012 – September 2016 6
Gambar 3	Persentase Penduduk Miskin menurut Wilayah, September 2012 – September 2016 7
Gambar 4	Distribusi Penduduk Miskin menurut Wilayah, September 2012 – September 2016 7
Gambar 5	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan, September 2012 – September 2016 8
Gambar 6	Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan, September 2012 – September 2016 9
Gambar 7	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, September 2012 – Maret 2016 10
Gambar 8	Angka Melek Huruf Penduduk Miskin, September 2012 – Maret 2016 11
Gambar 9	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Miskin, September 2012 – Maret 2016 11
Gambar 10	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas menurut Sektor Bekerja, September 2012 – Maret 2016 12
Gambar 11	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas menurut Status Bekerja, September 2012-Maret 2016 13
Gambar 12	Persentase Pengeluaran per Kapita per Bulan Rumah Tangga Miskin untuk Komoditi Makanan, September 2012 – Maret 2016 14
Gambar 13	Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Jamban Sendiri/Bersama, September 2012 – Maret 2016 ... 15
Gambar 14	Persentase Rumah Tangga Miskin dengan Luas Lantai Bangunan Tempat Tinggal $\leq 8 \text{ m}^2$, September 2012 – Maret 2016 16

POTRET KEMISKINAN DI JAWA TENGAH



JUMLAH PENDUDUK MISKIN

Pada Maret 2016, jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah mencapai **4.506,89 ribu jiwa**

13,27 persen



DI KABUPATEN MANAKAH PENDUDUK MISKIN TERBANYAK?

BREBES

merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terbesar yakni

347,98 ribu jiwa

WONOSOBO

merupakan kabupaten dengan persentase penduduk miskin terbesar yakni

20,53 %

Tamat SD/SLTP
56,94

Persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan

< SD
30,96

Pada umumnya penduduk miskin berpendidikan rendah

SLTA +
12,10



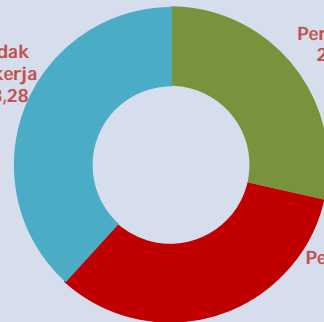
Pada umumnya penduduk miskin tidak bekerja

Persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas menurut sektor pekerjaan

Tidak Bekerja
38,28

Pertanian
28,56

Non Pertanian
33,16



76,65 %

Rumah tangga miskin menggunakan jamban sendiri/bersama



8,80 %

Rumah tangga miskin hanya menempati luas rumah \leq 8 meter persegi

1.1. Latar Belakang

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Salah satu aspek penting untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.

Badan Pusat Statistik (BPS) pertama kali melakukan penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 1984. Pada saat itu, penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin mencakup periode 1976-1981 dengan menggunakan data modul konsumsi Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Sejak tahun 1984, setiap tiga tahun sekali BPS secara rutin mengeluarkan jumlah dan persentase penduduk miskin. Sampai dengan tahun 1987, informasi mengenai jumlah dan persentase penduduk miskin hanya disajikan untuk tingkat nasional yang dipisahkan menurut daerah perkotaan dan perdesaan. Pada tahun 1990, informasi mengenai penduduk miskin sudah dapat disajikan sampai tingkat provinsi meskipun beberapa provinsi masih digabung. Provinsi-provinsi gabungan tersebut antara lain: Provinsi Jambi, Bengkulu, Timor Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Papua. Selanjutnya sejak tahun 1993, informasi mengenai jumlah dan persentase penduduk miskin sudah dapat disajikan untuk seluruh provinsi. Sejak tahun 2002, BPS telah menyajikan data dan informasi kemiskinan sampai tingkat kabupaten/kota dengan menggunakan data Susenas Kor (kecuali tahun 2008), pada tahun 2011 – 2014 menggunakan data gabungan Susenas Modul Konsumsi Triwulan I, II, III dan IV dan pada tahun 2015-2016 menggunakan data Susenas Konsumsi Pengeluaran.

1.2. Tujuan Penulisan

Publikasi ini dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Gambaran tersebut mencakup :

- a. Untuk mengetahui jumlah dan persentase penduduk miskin menurut provinsi dan daerah (perkotaan - perdesaan) tahun 2012-2016.
- b. Untuk mengetahui jumlah dan persentase penduduk miskin menurut kabupaten/kota tahun 2012-2016.
- c. Untuk mengetahui karakteristik rumah tangga miskin menurut kabupaten/kota tahun 2012-2016.

1.3. Ruang Lingkup dan Data yang Digunakan

Ruang lingkup publikasi ini mencakup tingkat kemiskinan secara provinsi menurut daerah perkotaan dan perdesaan serta tingkat kemiskinan secara kabupaten/kota. Tingkat kemiskinan secara provinsi merupakan kondisi Maret dan September sedangkan tingkat kemiskinan secara kabupaten/kota merupakan kondisi September (tahun 2012-2014) dan Maret (tahun 2015-2016). Karakteristik rumah tangga miskin juga disajikan pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Sumber data yang digunakan dalam publikasi ini adalah data Susenas. Tahun 2012 - 2014 menggunakan data Susenas Modul Konsumsi Gabungan Triwulan I-IV sedangkan tahun 2015-2016 menggunakan data Susenas Konsumsi Pengeluaran Maret.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I menjelaskan latar belakang penulisan, tujuan penulisan, ruang lingkup dan data yang digunakan serta sistematika penulisan.

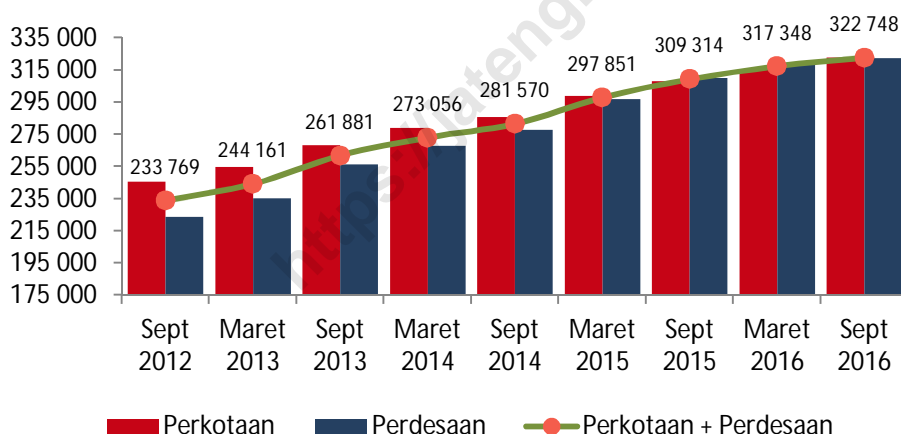
Bab II membahas tentang jumlah dan persentase penduduk miskin, kedalaman kemiskinan, keparahan kemiskinan, profil rumah tangga miskin menurut kabupaten/kota serta program bantuan sosial yang telah dilaksanakan oleh pemerintah di Provinsi Jawa Tengah.

Bab III merupakan penutup yang menggaris-bawahi hal-hal penting yang diharapkan mampu memberikan gambaran umum tingkat kemiskinan dan indikator kemiskinan lainnya menurut kabupaten/kota.

2.1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan

Garis Kemiskinan Terus Mengalami Peningkatan

Tingkat kemiskinan selama setahun terakhir dapat dilihat melalui analisis tren tingkat kemiskinan (kondisi September 2015 dan September 2016). Salah satu indikator yang digunakan dalam analisis kemiskinan adalah garis kemiskinan. Pada periode September 2015-September 2016, garis kemiskinan meningkat dari Rp 309.314,- menjadi Rp 322.748,- perkapita per bulan atau sebesar 4,34 persen (Lampiran Tabel 3). Keadaan serupa terjadi di daerah perkotaan dan perdesaan yaitu masing-masing meningkat sebesar 4,75 persen dan 3,93 persen.



Gambar 1
Perkembangan
Garis Kemiskinan
menurut Daerah,
September 2012 –
September 2016

Kota Surakarta Mempunyai Garis Kemiskinan Tertinggi

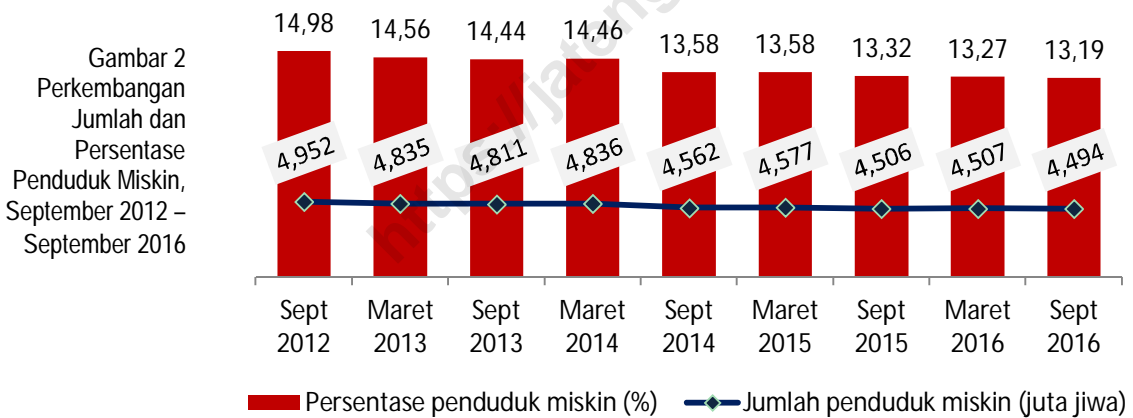
Menurut kabupaten/kota, Kota Surakarta merupakan kabupaten/kota yang mempunyai garis kemiskinan tertinggi yaitu Rp 430.293,-. Sementara itu, Kabupaten Batang mempunyai garis kemiskinan yang terendah yaitu Rp 240.541,- (kondisi Maret 2016, Lampiran Tabel 9).

Jumlah Penduduk Miskin 2016 Turun Dibanding 2015

Jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah pada September 2016 sebesar 4.493,75 ribu orang (13,19 persen), turun dibanding September 2015 yang sebesar 4.505,78 ribu orang (13,32 persen). Selama periode September 2015-September 2016, penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah 89,98 ribu orang, sementara di daerah perdesaan berkurang 102,01 ribu orang (Lampiran Tabel 1).

Selama periode September 2012-September 2016 Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah Mengalami Penurunan

Perkembangan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah pada periode tahun 2012-2016 ditunjukkan pada Gambar 2 dan Lampiran Tabel 1. Secara umum, pada periode September 2012-September 2016 tingkat kemiskinan di Jawa Tengah mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentasenya, perkecualian pada Maret 2014.

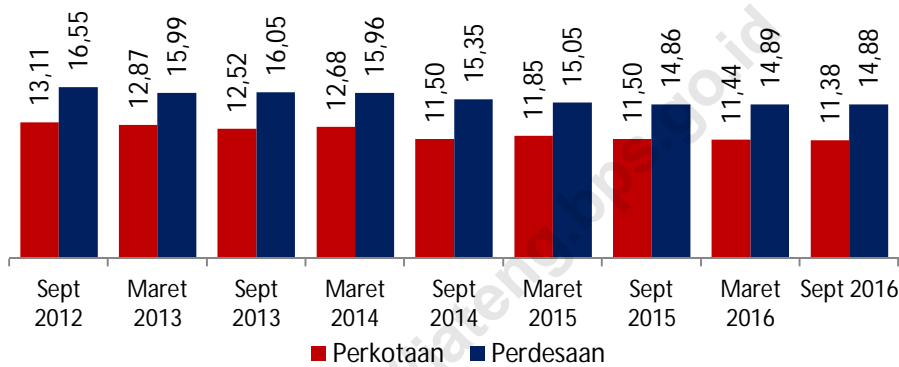


Disparitas Tingkat Kemiskinan antar Kabupaten/Kota Cukup Tinggi

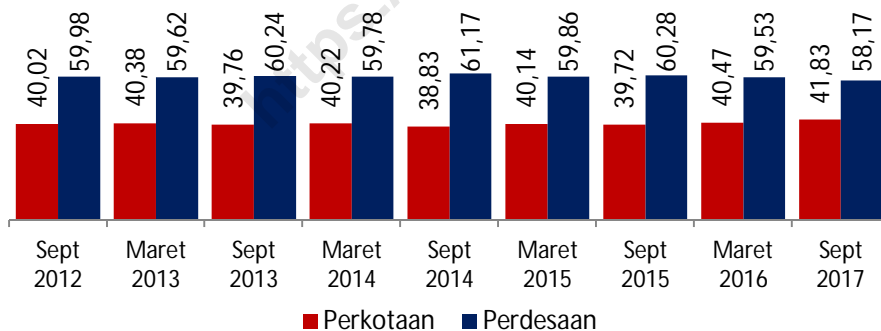
Dengan menggunakan standar garis kemiskinan tiap kabupaten/kota, maka jumlah dan persentase penduduk miskin pada setiap kabupaten/kota dapat dihitung. Lampiran Tabel 9 menunjukkan jumlah dan persentase penduduk miskin menurut kabupaten/kota pada kondisi Maret 2016. Pada tabel tersebut tingkat kemiskinan terendah ada di Kota Semarang sebesar 4,85 persen, sementara yang tertinggi ada di Kabupaten Wonosobo yang mencapai angka sebesar 20,53 persen.

Di Perkotaan Penurunan Tingkat Kemiskinan Lebih Cepat

Selama periode 2012-2016, secara umum tingkat kemiskinan di perkotaan maupun di perdesaan mengalami penurunan. Pada periode tersebut penurunan persentase penduduk miskin di perkotaan relatif lebih cepat dibanding di perdesaan. Di perkotaan, pada September 2012, persentase penduduk miskin sebesar 13,11 persen dan pada September 2016 turun menjadi 11,38 persen. Sementara itu, di perdesaan, persentase penduduk miskin pada September 2012 sebesar 16,55 persen dan pada September 2016 turun menjadi 14,88 persen (Gambar 3).



Gambar 3
Persentase
Penduduk Miskin
menurut Wilayah,
September 2012 –
September 2016



Gambar 4
Distribusi
Penduduk Miskin
menurut Wilayah,
September 2012 –
September 2016

Sebagian Besar Penduduk Miskin Tersebar di Perdesaan

Pada periode September 2012 – September 2016, sebagian besar penduduk miskin di Jawa Tengah tersebar di wilayah perdesaan yaitu sebesar 2.970,07 ribu orang atau 59,98 persen pada September 2012 dan 2.614,20 ribu orang atau 58,17 persen pada September 2016 (Lampiran Tabel 2 dan Gambar 4).

2.2. Indeks Kedalaman Kemiskinan

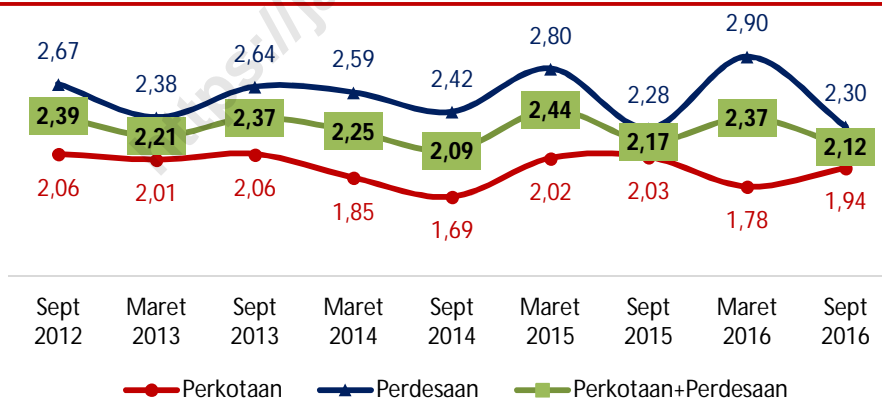
Indeks Kedalaman Kemiskinan di Perdesaan Lebih Tinggi daripada di Perkotaan

Jika dirinci menurut daerah, indeks kedalaman kemiskinan (P1) di daerah perdesaan pada periode September 2015 dan September 2016 lebih tinggi dibanding di perkotaan. Artinya, kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan di perdesaan relatif lebih lebar daripada di perkotaan. Dari Gambar 5 juga terlihat bahwa indeks kedalaman kemiskinan di perkotaan mengalami penurunan sebaliknya di perdesaan mengalami kenaikan pada periode September 2015-September 2016.

Indeks Kedalaman Kemiskinan Berfluktuasi antar Periode

Bila dilihat perkembangan selama periode 2012-2016, indeks kedalaman kemiskinan terlihat berfluktuasi. Secara umum, indeks kedalaman kemiskinan turun dari 2,39 (September 2012) menjadi 2,12 (September 2016). Ditinjau menurut daerah, indeks kedalaman kemiskinan di perkotaan dan di perdesaan juga menunjukkan kecenderungan menurun.

Gambar 5
Perkembangan
Indeks Kedalaman
Kemiskinan,
September 2012 –
September 2016



Kota Salatiga Mempunyai Indeks Kedalaman Kemiskinan Terendah

Menurut kabupaten/kota, Kota Salatiga merupakan kabupaten/kota dengan nilai indeks kedalaman kemiskinan yang terendah yaitu 0,60. Sementara itu, Kabupaten Wonosobo mempunyai nilai indeks kedalaman kemiskinan yang tertinggi yaitu 4,02 (kondisi Maret 2016, Lampiran Tabel 9).

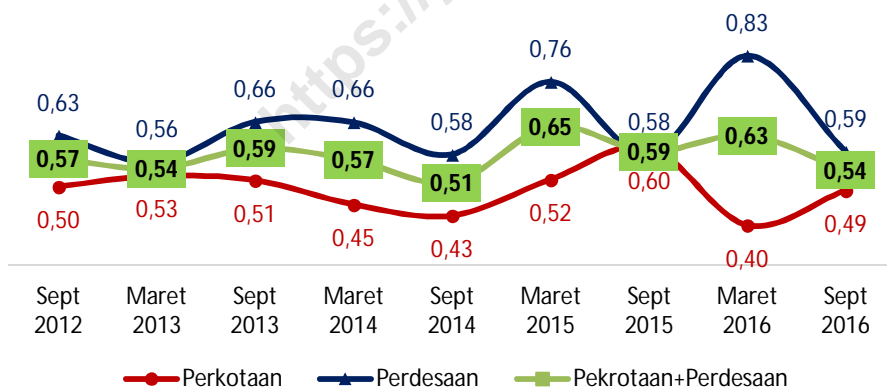
2.3. Indeks Keparahan Kemiskinan

Pada Periode September 2015-September 2016, Indeks Keparahan Kemiskinan Turun Sebesar 0,05 Poin

Selain indeks kedalaman kemiskinan, indikator lain yang perlu dilihat adalah indeks keparahan kemiskinan (P2). Selain menekan jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan seharusnya juga dapat mengurangi indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Jika dirinci menurut daerah, pada periode September 2015 – September 2016, indeks keparahan kemiskinan menurun dari 0,60 menjadi 0,49 di perkotaan dan naik dari 0,58 menjadi 0,59 di perdesaan.

Indeks Keparahan Kemiskinan Berfluktuasi antar Periode

Bila dikaji perkembangan selama periode lebih panjang, yaitu periode 2012-2016, indeks keparahan kemiskinan terlihat berfluktuasi. Secara umum, indeks keparahan kemiskinan kenaikan dari 0,57 (September 2012) menjadi 0,54 (September 2016). Ditinjau menurut daerah, indeks kedalaman kemiskinan di perkotaan menurun sedangkan di perdesaan menunjukkan peningkatan.



Gambar 6
Perkembangan
Indeks Keparahan
Kemiskinan,
September 2012 –
September 2016

Jepara Mempunyai Indeks Keparahan Kemiskinan Terendah

Menurut kabupaten/kota, Kabupaten Jepara merupakan kabupaten/kota dengan nilai indeks keparahan kemiskinan yang terendah yaitu 0,10. Sementara itu, Kabupaten Purbalingga mempunyai nilai indeks kedalaman kemiskinan yang tertinggi yaitu 1,20 (kondisi Maret 2016, Lampiran Tabel 9).

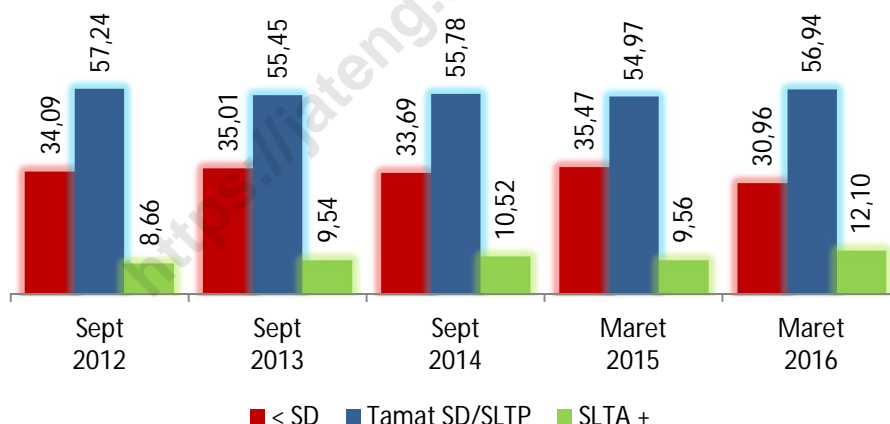
2.4. Karakteristik Penduduk Miskin

2.4.1. Karakteristik Pendidikan

Pendidikan Tertinggi Sebagian Besar Penduduk Miskin adalah Tamat SD/SLTP

Tingkat pendidikan juga berperan dalam mempengaruhi angka kemiskinan. Orang yang berpendidikan lebih tinggi biasanya akan mempunyai peluang yang lebih rendah untuk menjadi miskin. Pada September 2012–Maret 2016, pendidikan tertinggi sebagian besar penduduk miskin usia 15 tahun ke atas cenderung tamat SD/SLTP yaitu sebesar 57,24 persen pada September 2012 dan 56,94 persen pada Maret 2016. Sedangkan untuk pendidikan tertinggi tamat SLTA ke atas mengalami peningkatan sebesar dari 8,66 persen pada September 2012 menjadi 12,10 persen pada Maret 2016 (Gambar 7).

Gambar 7
Persentase
Penduduk Miskin
Usia 15 Tahun ke
Atas menurut
Pendidikan
Tertinggi yang
Ditamatkan,
September 2012-
Maret 2016

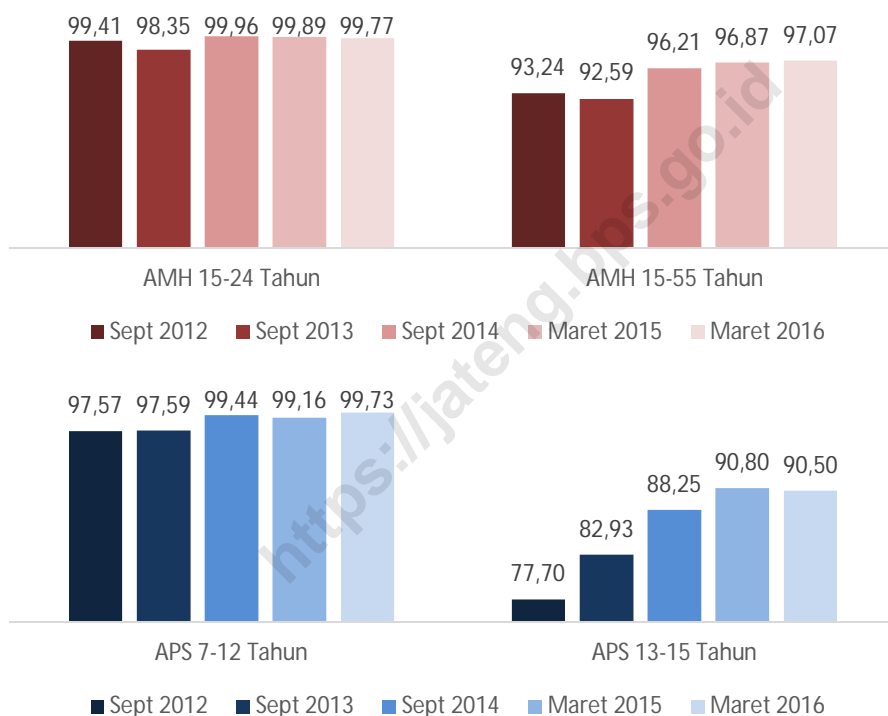


38,47 persen Penduduk Miskin di Kota Surakarta Tamatan SLTA ke Atas

Persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang mempunyai pendidikan tertinggi tamat SLTA ke atas adalah di Kota Surakarta yaitu sebesar 38,47 persen. Sementara itu, di Kabupaten Wonosobo hanya sebesar 2,58 persen. Selengkapnya pada Lampiran Tabel 14.

Angka Melek Huruf (AMH) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Miskin Cenderung Mengalami Kenaikan

Pada September 2012–Maret 2016, AMH penduduk miskin baik untuk kelompok usia 15-24 tahun maupun untuk golongan umur 15-55 tahun fluktuatif mengalami penurunan. AMH penduduk miskin untuk kelompok usia 15-24 tahun sebesar 99,41 pada September 2012 menjadi 99,77 pada Maret 2016. Sedangkan untuk golongan umur 15-55 tahun juga mengalami kenaikan pada periode yang sama (Gambar 8).



Gambar 8
Angka Melek Huruf
Penduduk Miskin,
September 2012-
Maret 2016

Gambar 9
Angka Partisipasi
Sekolah
Penduduk
Miskin,
September 2012-
Maret 2016

Angka Melek Huruf Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota lebih dari 90 persen

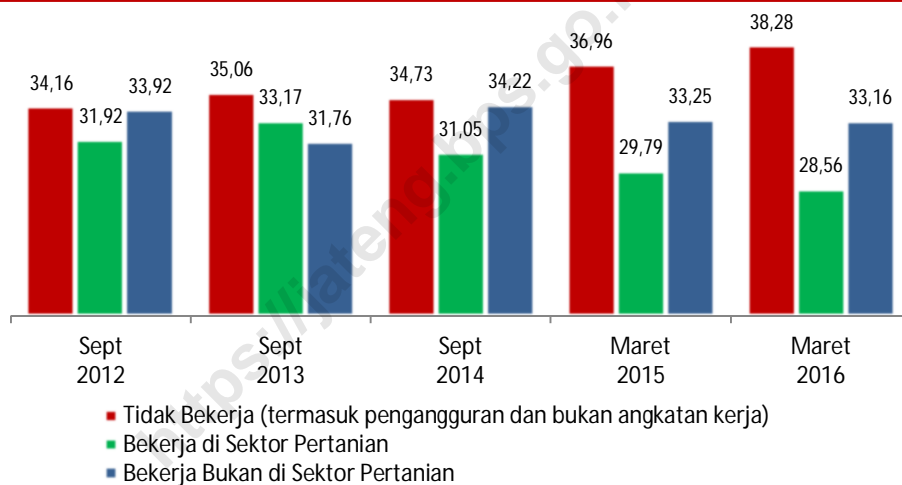
Sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Tengah telah mencapai angka 100 persen untuk AMH penduduk miskin golongan umur 15-24 tahun maupun APS penduduk miskin golongan umur 7-12 tahun. Sedangkan untuk AMH penduduk miskin golongan umur 15-55 tahun sudah lebih dari 90 persen. APS golongan umur 13-15 tahun paling rendah di Kabupaten Pati yaitu hanya sebesar 75,08 persen (Lampiran Tabel 19).

2.4.2. Karakteristik Ketenagakerjaan

Lebih dari 30 persen, Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Tidak Bekerja

Sumber penghasilan utama rumah tangga menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan yang diharapkan dapat mencerminkan kondisi sosial ekonomi suatu rumah tangga. Selama 5 tahun terakhir, persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja (termasuk pengangguran dan bukan angkatan kerja) lebih dari 30 persen. Pada tahun 2016 tercatat sebesar 38,28 persen lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya.

Gambar 10
Persentase
Penduduk Miskin
Usia 15 Tahun ke
Atas menurut
Sektor Bekerja,
September 2012 –
Maret 2016



Pada Umumnya Penduduk Miskin Menggantungkan Hidupnya dari Sektor Pertanian

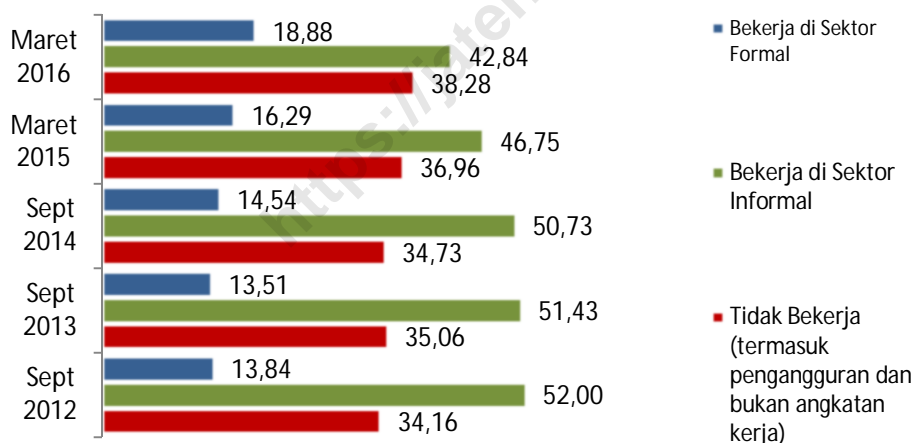
Karakteristik ketenagakerjaan yang dapat menggambarkan adanya perbedaan antara rumah tangga miskin dan tidak miskin adalah lapangan usaha atau sektor sumber penghasilan utama rumah tangga dan status pekerjaan. Profil orang miskin seringkali melekat dengan mereka yang bekerja di sektor pertanian, seperti petani gurem, nelayan, buruh tani dan perkebunan, serta pencari kayu dan madu di hutan. Secara umum, rumah tangga miskin menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian (28,56 persen pada Maret 2016). Informasi mengenai penduduk yang bekerja disajikan pada Lampiran Tabel 20 – 29.

Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas yang Tidak Bekerja di Kabupaten Tegal Tertinggi di Jawa Tengah

Persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja yang tertinggi adalah Kabupaten Tegal yaitu sebesar 49,26 persen. Persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor pertanian yang tertinggi terdapat di Kabupaten Wonosobo yaitu sebesar 57,39 persen sedangkan yang bekerja bukan di sektor pertanian yang tertinggi di Kota Surakarta yaitu sebesar 67,35 persen (Lampiran Tabel 24).

Sebagian Besar Penduduk Miskin Berstatus sebagai Pekerja Informal

Ditinjau dari status pekerjaan utama, pada sebagian besar penduduk miskin berstatus sebagai pekerja informal. Namun, selama periode 2012-2016, persentase penduduk miskin yang bekerja di sektor informal mengalami penurunan dan cenderung beralih ke sektor formal. Pada Maret 2016 tercatat bahwa penduduk miskin berusia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor informasi sebesar 42,84 persen.



Gambar 11
Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas menurut Status Bekerja, September 2012 – Maret 2016

Kabupaten Temanggung, 69,19 persen Penduduk Miskin Berusia 15 Tahun ke Atas Bekerja di Sektor Informal

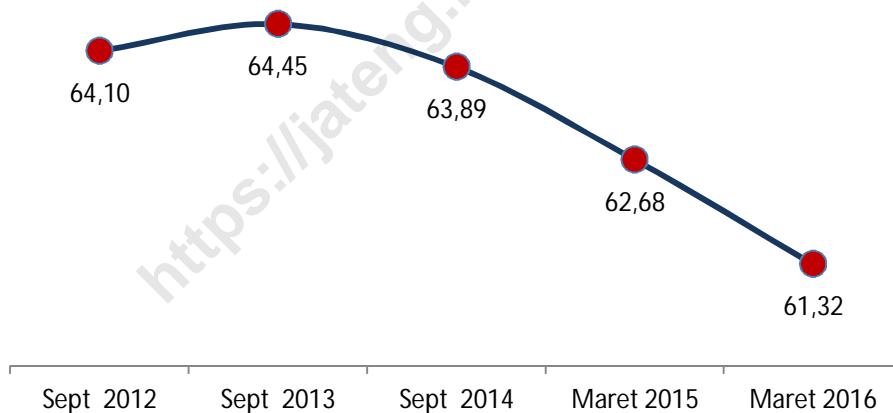
Persentase penduduk miskin berusia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor informal tertinggi di Kabupaten Temanggung (69,19 persen), diikuti Kabupaten Wonosobo (65,94 persen) dan Kabupaten Wonogiri (63,86 persen). Selengkapnya terdapat pada Lampiran Tabel 29.

2.4.3. Pengeluaran per Kapita per Bulan

Sebagian Besar Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Pada Rumah Tangga Miskin Untuk Komoditi Makanan

Tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga dapat dilihat dari status miskin atau tidak miskin suatu rumah tangga yang ditentukan dari rata-rata pengeluaran per kapita per bulan suatu rumah tangga. Pengeluaran penduduk dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu pengeluaran untuk membiayai komoditi makanan dan pengeluaran untuk membiayai komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Sebagian besar pengeluaran per kapita per bulan adalah untuk membiayai komoditi makanan. Dapat dilihat pada Gambar 12, bahwa sebagian besar pengeluaran per kapita per bulan pada rumah tangga miskin adalah untuk komoditi makanan.

Gambar 12
Persentase
Pengeluaran per
Kapita per Bulan
Rumah Tangga
Miskin untuk
Komoditi
Makanan,
September 2012 –
Maret 2016



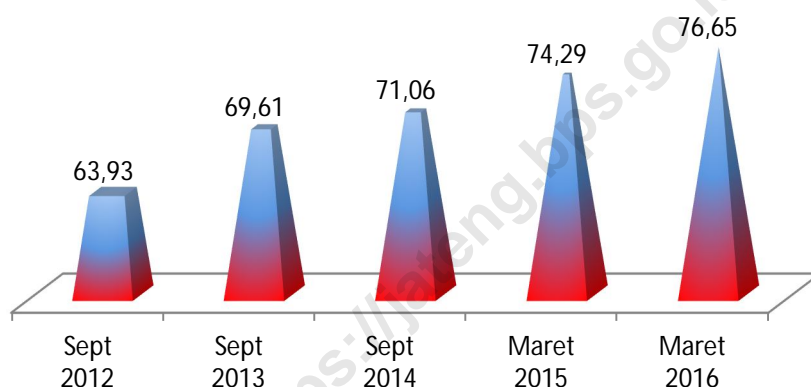
Pengeluaran Untuk Komoditi Makanan Cenderung Menurun

Pada periode September 2012 – Maret 2016, persentase pengeluaran per kapita per bulan rumah tangga miskin cenderung menurun, yaitu dari 64,10 persen menjadi 61,32 persen. Pengeluaran per kapita per bulan untuk makanan pada tahun 2016 paling kecil di Kabupaten Wonosobo sebesar 54,42 persen, sedangkan yang terbesar di Kabupaten Grobogan (66,50 persen). Selengkapnya pada Lampiran Tabel 30.

2.4.5. Karakteristik Perumahan

Sebanyak 76,65 persen Rumah Tangga Miskin Menggunakan Jamban Sendiri/Bersama

Ketersediaan jamban menjadi salah satu fasilitas rumah sehat. Fasilitas jamban dibedakan atas jamban sendiri, jamban bersama/komunal dan jamban umum/tidak ada. Persentase rumah tangga miskin yang menggunakan jamban sendiri/bersama sebesar 76,65 persen. Pada periode 2012-2016, persentase rumah tangga miskin yang menggunakan jamban sendiri/bersama semakin meningkat.



Gambar 13
Persentase
Rumah Tangga
Miskin yang
Menggunakan
Jamban
Sendiri/Bersama,
September 2012 –
Maret 2016

98 persen Penduduk Miskin di Kota Salatiga Menggunakan Jamban Sendiri/Bersama

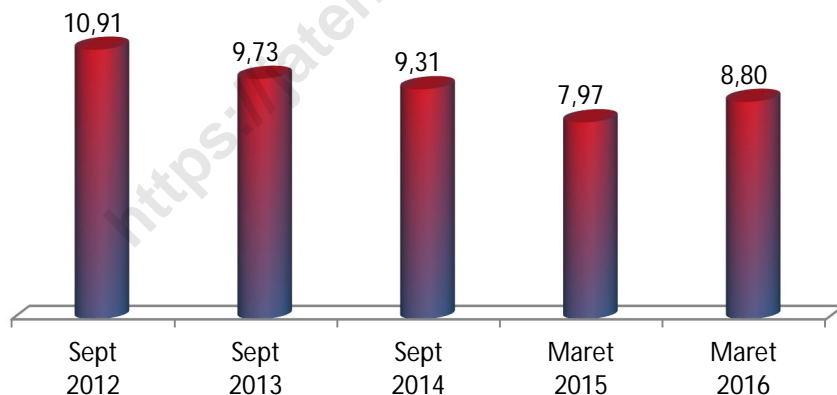
Pada Maret 2016, persentase rumah tangga miskin yang menggunakan jamban sendiri/bersama tertinggi di Jawa Tengah adalah di Kota Salatiga yang mencapai 98,00 persen. Sedangkan persentase rumah tangga miskin yang menggunakan jamban sendiri/bersama yang terendah terdapat di Kabupaten Banjarnegara yang hanya sebesar 53,47 persen (Lampiran Tabel 35).

Rumah Tangga Miskin yang Menempati Rumah dengan Luas Lantai per Kapita kurang dari 8 m² Sebesar 8,80 persen

Salah satu indikator perumahan yang digunakan untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga adalah keleluasaan pribadi (*privacy*) dalam tempat tinggal. Keleluasaan pribadi tercermin dari luas lantai rumah per kapita (m²). Menurut Departemen Kesehatan, salah satu syarat rumah dikatakan sehat adalah luas lantai rumah per kapitanya minimal 8 m². Lampiran Tabel 36 – 40 menyajikan karakteristik rumah tangga miskin berdasarkan luas lantai per kapita.

Pada periode September 2012 – Maret 2016, persentase rumah tangga miskin dengan luas lantai bangunan tempat tinggal ≤ 8 m² cenderung mengalami penurunan, yaitu sebesar 10,91 persen pada September 2012 menjadi 8,80 persen pada Maret 2016 (Gambar 14). Sebagian besar (57,42 persen) rumah tangga miskin telah menempati rumah dengan luas lantai per kapita lebih dari 15 m².

Gambar 14
Persentase
Rumah Tangga
Miskin dengan
Luas Lantai
Bangunan Tempat
Tinggal ≤ 8 m²,
September 2012 –
Maret 2016



70,74 Persen Rumah Tangga Miskin di Kota Surakarta Menempati Rumah yang Luas Lantai per Kapita nya kurang dari 8 m²

Di Kota Surakarta sebesar 70,74 persen rumah tangga miskin menempati tempat tinggal dengan luas lantai per kapitanya kurang dari atau sama dengan 8 m². Sedangkan di Kabupaten Wonogiri sudah menempati tempat tinggal yang luas lantai per kapitanya lebih dari 8 m² (Lampiran Tabel 40).

2.5. Program Penanggulangan Kemiskinan

Rata-rata Raskin/Rastra yang Diterima oleh Rumah Tangga Miskin Hanya 6,17 kg

Program Raskin/Rastra adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di bidang pangan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat berupa bantuan beras bersubsidi kepada rumah tangga berpendapatan rendah (rumah tangga miskin dan rentan miskin).

Pada Maret 2016, tercatat sebanyak 83,80 persen rumah tangga miskin menerima raskin/rastra. Artinya masih terdapat rumah tangga miskin yang tidak menerima raskin/rastra. Adapun jumlah raskin/rastra yang diterima oleh rumah tangga miskin rata-ratanya adalah 6,17 kg dan harga rata-rata yang harus dibayar sebesar Rp 1.947,- (Lampiran Tabel 41).

Pendistribusian Raskin/Rastra di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Bervariasi

Di Kabupaten Pemalang, sebanyak 99,01 persen rumah tangga miskin menerima raskin/rastra, namun rata-rata raskin/rastra yang diterima hanya sebesar 5,83 kg dengan harga rata-rata sebesar Rp 1.910,-. Sedangkan di Kota Surakarta hanya 65,96 persen rumah tangga miskin yang menerima raskin/rastra namun menerima rata-rata sebesar 12,77 kg dengan harga rata-rata sebesar Rp 1.720,-. Hal ini mengindikasikan bahwa pendistribusian raskin/rastra di setiap kabupaten/kota di Jawa Tengah sangat bervariasi.

Pada periode September 2015-September 2016, garis kemiskinan meningkat dari Rp 309.314,- menjadi Rp 322.748,-perkapita per bulan atau sebesar 4,34 persen. Jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah pada September 2016 sebesar 4.493,75 ribu orang (13,19 persen), turun dibanding September 2015 yang sebesar 4.505,78 ribu orang (13,32 persen). Selama periode September 2015-September 2016, penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah 89,98 ribu orang, sementara di daerah perdesaan berkurang 102,01 ribu orang.

Bila dilihat perkembangan selama periode 2012-2016, indeks kedalaman kemiskinan terlihat fluktuasi. Secara umum, indeks kedalaman kemiskinan turun dari 2,39 (September 2012) menjadi 2,12 (September 2016). Ditinjau menurut daerah, indeks kedalaman kemiskinan di perkotaan dan di perdesaan juga menunjukkan kecenderungan menurun.

Indeks kedalaman kemiskinan terlihat berfluktuasi. Secara umum, indeks keparahan kemiskinan kenaikan dari 0,57 (September 2012) menjadi 0,54 (September 2016). Ditinjau menurut daerah, indeks kedalaman kemiskinan di perkotaan menurun sedangkan di perdesaan menunjukkan peningkatan.

Profil rumah tangga miskin tahun 2016 yang memiliki keterkaitan erat dengan konsep kemiskinan secara konseptual, antara lain:

- a. Penduduk miskin usia 15 tahun ke atas sebagian besar adalah tamatan SD/SLTP yaitu sebesar 56,94 persen.
- b. AMH penduduk miskin kelompok usia 15-24 tahun lebih besar dari AMH kelompok usia 15-55 tahun, yaitu masing-masing sebesar 99,77 dan 97,07.
- c. APS penduduk miskin kelompok usia 7-12 tahun lebih besar dari APS kelompok usia 13-15 tahun, yaitu masing-masing sebesar 99,73 dan 90,50.
- d. Persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja (termasuk pengangguran dan bukan angkatan kerja) sebesar 38,28 persen.
- e. Persentase pengeluaran penduduk miskin sebagian besar masih digunakan untuk konsumsi makanan yaitu sebesar 61,32 persen.
- f. Persentase rumah tangga miskin yang menggunakan jamban sendiri/bersama sebesar 76,65 persen.

- g. Persentase rumah tangga miskin dengan luas lantai bangunan tempat tinggal $\leq 8 \text{ m}^2$ sebesar 8,80 persen.
- h. Persentase rumah tangga miskin yang pernah membeli beras raskin sebesar 83,80 persen dengan jumlah rata-rata yang dibeli 6,17 kg dan harga rata-ratanya Rp. 1.947,-.

Informasi mengenai profil kemiskinan sangat dibutuhkan oleh pengambil kebijakan untuk penanganan masalah kemiskinan. Dengan mengetahui profil kemiskinan, pengambil kebijakan dapat lebih memfokuskan program penanggulangan kemiskinan sehingga dapat lebih sesuai dengan kebutuhan penduduk miskin tersebut.

<https://jateng.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS). 2013. *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2012*. Jakarta : Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2014. *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2013*. Jakarta : Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2015. *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2014*. Jakarta : Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2016. *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2015*. Jakarta : Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2017. *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2016*. Jakarta : Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2013. *Berita Resmi Statistik, Profil Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah September 2012*. Semarang : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2013. *Berita Resmi Statistik, Profil Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Maret 2013*. Semarang : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2014. *Berita Resmi Statistik, Profil Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah September 2013*. Semarang : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2014. *Berita Resmi Statistik, Profil Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Maret 2014*. Semarang : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2015. *Berita Resmi Statistik, Profil Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah September 2014*. Semarang : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2015. *Berita Resmi Statistik, Profil Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Maret 2015*. Semarang : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2016. *Berita Resmi Statistik, Profil Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah September 2015*. Semarang : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2016. *Berita Resmi Statistik, Profil Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Maret 2016*. Semarang : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.

- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2017. *Berita Resmi Statistik, Profil Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah September 2016*. Semarang : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Siregar, Hermanto dan Wahyuniarti, Dwi. 2008. *Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin*. http://pustaka.blog.mb.ipb.ac.id/files/2010/06/dampak-ptbmbhn-ek_hermanto.pdf, 13 April 2016.
- Suryawati, Chriswardani. 2005. *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*. Jurnal Manajemen Pembangunan dan Kebijakan, Volume 08, No. 03, Edisi September (121-129).

<https://jateng.bps.go.id>

LAMPIRAN TABEL

Tabel 1
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin menurut Wilayah,
September 2012 - September 2016

Tahun	Perkotaan (K)		Perdesaan (D)		Perkotaan (K) + Perdesaan (D)	
	Jumlah (000 jiwa)	%	Jumlah (000 jiwa)	%	Jumlah (000 jiwa)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
September 2012 ¹⁾	1 981,99	13,11	2 970,07	16,55	4 952,06	14,98
Maret 2013 ¹⁾	1 952,41	12,87	2 882,54	15,99	4 834,95	14,56
September 2013 ¹⁾	1 913,08	12,52	2 898,26	16,05	4 811,34	14,44
Maret 2014	1 945,29	12,68	2 891,17	15,96	4 836,45	14,46
September 2014	1 771,53	11,50	2 790,29	15,35	4 561,83	13,58
Maret 2015	1 837,19	11,85	2 739,85	15,05	4 577,04	13,58
September 2015	1 789,57	11,50	2 716,21	14,86	4 505,78	13,32
Maret 2016	1 824,08	11,44	2 682,81	14,89	4 506,89	13,27
September 2016	1 879,55	11,38	2 614,20	14,88	4 493,75	13,19

Keterangan: ¹⁾ Backcasting dengan penimbang hasil proyeksi SP2010

Tabel 2
Jumlah dan Distribusi Persentase Penduduk Miskin menurut Wilayah,
September 2012 - September 2016

Tahun	Perkotaan (K)		Perdesaan (D)		Perkotaan (K) + Perdesaan (D)	
	Jumlah (000 jiwa)	%	Jumlah (000 jiwa)	%	Jumlah (000 jiwa)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
September 2012 ¹⁾	1 981,99	40,02	2 970,07	59,98	4 952,06	100,00
Maret 2013 ¹⁾	1 952,41	40,38	2 882,54	59,62	4 834,95	100,00
September 2013 ¹⁾	1 913,08	39,76	2 898,26	60,24	4 811,34	100,00
Maret 2014	1 945,29	40,22	2 891,17	59,78	4 836,45	100,00
September 2014	1 771,53	38,83	2 790,29	61,17	4 561,83	100,00
Maret 2015	1 837,19	40,14	2 739,85	59,86	4 577,04	100,00
September 2015	1 789,57	39,72	2 716,21	60,28	4 505,78	100,00
Maret 2016	1 824,08	40,47	2 682,81	59,53	4 506,89	100,00
September 2016	1 879,55	41,83	2 614,20	58,17	4 493,75	100,00

Keterangan: ¹⁾ Backcasting dengan penimbang hasil proyeksi SP2010

Tabel 3
Garis Kemiskinan menurut Wilayah,
September 2012 - September 2016 (Rupiah/Kapita/Bulan)

Tahun	Perkotaan (K)	Perdesaan (D)	Perkotaan (K) + Perdesaan (D)
(1)	(4)	(7)	(10)
September 2012 ¹⁾	245 817	223 622	233 769
Maret 2013 ¹⁾	254 800	235 202	244 161
September 2013 ¹⁾	268 397	256 368	261 881
Maret 2014	279 036	267 991	273 056
September 2014	286 014	277 802	281 570
Maret 2015	299 011	296 864	297 851
September 2015	308 163	310 295	309 314
Maret 2016	315 269	319 188	317 348
September 2016	322 799	322 489	322 748

Keterangan: ¹⁾ Backcasting dengan penimbang hasil proyeksi SP2010

Tabel 4
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
menurut Wilayah, September 2012 - September 2016

Tahun	Perkotaan (K)		Perdesaan (D)		Perkotaan (K) + Perdesaan (D)	
	P1	P2	P1	P2	P1	P2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
September 2012 ¹⁾	2,06	0,50	2,67	0,63	2,39	0,57
Maret 2013 ¹⁾	2,01	0,53	2,38	0,56	2,21	0,54
September 2013 ¹⁾	2,06	0,51	2,64	0,66	2,37	0,59
Maret 2014	1,85	0,45	2,59	0,66	2,25	0,57
September 2014	1,69	0,43	2,42	0,58	2,09	0,51
Maret 2015	2,02	0,52	2,80	0,76	2,44	0,65
September 2015	2,03	0,60	2,28	0,58	2,17	0,59
Maret 2016	1,78	0,40	2,90	0,83	2,37	0,63
September 2016	1,94	0,49	2,30	0,59	2,12	0,54

Keterangan: ¹⁾ Backcasting dengan penimbang hasil proyeksi SP2010

Tabel 5
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1),
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dan Garis Kemiskinan
menurut Kabupaten/Kota, September 2012 ¹⁾

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)	Persentase Penduduk Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kab. Cilacap	265,7	15,92	2,22	0,50	240 025
2	Kab. Banyumas	309,8	19,44	3,42	0,91	271 800
3	Kab. Purbalingga	184,9	21,19	3,72	0,96	247 508
4	Kab. Banjarnegara	167,0	18,87	3,39	0,94	205 369
5	Kab. Kebumen	262,8	22,40	3,35	0,75	250 413
6	Kab. Purworejo	114,8	16,32	2,78	0,65	254 314
7	Kab. Wonosobo	172,4	22,50	3,91	1,04	242 047
8	Kab. Magelang	169,4	13,97	2,09	0,48	218 950
9	Kab. Boyolali	131,5	13,88	2,14	0,51	235 399
10	Kab. Klaten	191,3	16,71	2,14	0,47	296 530
11	Kab. Sukoharjo	85,7	10,15	1,78	0,49	259 184
12	Kab. Wonogiri	137,9	14,67	1,76	0,33	221 019
13	Kab. Karanganyar	117,4	14,07	2,24	0,50	255 072
14	Kab. Sragen	145,3	16,72	2,38	0,55	234 254
15	Kab. Grobogan	214,6	16,13	2,55	0,61	260 435
16	Kab. Blora	127,1	15,10	2,19	0,47	221 088
17	Kab. Rembang	132,4	21,88	2,76	0,60	261 156
18	Kab. Pati	165,0	13,61	1,72	0,35	288 271
19	Kab. Kudus	69,3	8,63	0,92	0,19	276 317
20	Kab. Jepara	107,0	9,38	0,94	0,18	263 266
21	Kab. Demak	181,6	16,73	2,75	0,68	276 041
22	Kab. Semarang	90,6	9,40	1,57	0,38	244 762
23	Kab. Temanggung	89,5	12,32	1,85	0,41	212 487
24	Kab. Kendal	121,2	13,17	1,59	0,30	253 276
25	Kab. Batang	89,8	12,40	1,89	0,43	195 983
26	Kab. Pekalongan	118,6	13,85	1,49	0,24	270 026
27	Kab. Pemasang	245,9	19,27	2,51	0,50	251 986
28	Kab. Tegal	151,7	10,75	1,14	0,23	239 207
29	Kab. Brebes	371,4	21,12	3,07	0,77	281 601
30	Kota Magelang	12,3	10,31	1,48	0,33	313 250
31	Kota Surakarta	60,7	12,00	1,33	0,28	361 517
32	Kota Salatiga	12,6	7,11	0,77	0,13	277 039
33	Kota Semarang	83,3	5,13	0,80	0,19	297 848
34	Kota Pekalongan	27,3	9,47	1,09	0,19	294 586
35	Kota Tegal	24,4	10,04	0,95	0,15	305 818
Provinsi Jawa Tengah		4 952,1	14,98	2,39	0,57	233 769

Keterangan: ¹⁾ Backcasting dengan penimbang hasil proyeksi SP2010

Tabel 6
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1),
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dan Garis Kemiskinan
menurut Kabupaten/Kota, September 2013 ¹⁾

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)	Persentase Penduduk Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kab. Cilacap	255,7	15,24	2,06	0,45	256 615
2	Kab. Banyumas	296,8	18,44	3,24	0,83	295 742
3	Kab. Purbalingga	181,1	20,53	3,20	0,73	265 262
4	Kab. Banjarnegara	166,8	18,71	2,91	0,77	221 056
5	Kab. Kebumen	251,1	21,32	3,57	0,91	267 763
6	Kab. Purworejo	109,0	15,44	1,98	0,43	273 481
7	Kab. Wonosobo	170,1	22,08	4,26	1,25	258 522
8	Kab. Magelang	171,0	13,96	1,72	0,34	235 430
9	Kab. Boyolali	126,5	13,27	2,35	0,56	247 845
10	Kab. Klaten	179,5	15,60	2,37	0,55	315 566
11	Kab. Sukoharjo	84,1	9,87	0,91	0,14	279 400
12	Kab. Wonogiri	132,2	14,02	1,74	0,37	235 728
13	Kab. Karanganyar	114,4	13,58	2,36	0,61	275 865
14	Kab. Sragen	139,0	15,93	2,38	0,52	247 495
15	Kab. Grobogan	199,0	14,87	2,20	0,53	278 786
16	Kab. Blora	123,8	14,64	2,39	0,59	237 850
17	Kab. Rembang	128,0	20,97	3,40	0,88	284 160
18	Kab. Pati	157,9	12,94	1,83	0,41	314 609
19	Kab. Kudus	70,1	8,62	0,78	0,12	299 097
20	Kab. Jepara	106,9	9,23	1,12	0,25	285 287
21	Kab. Demak	172,5	15,72	2,19	0,47	299 773
22	Kab. Semarang	83,2	8,51	0,92	0,17	263 352
23	Kab. Temanggung	91,1	12,42	1,46	0,26	229 548
24	Kab. Kendal	117,7	12,68	1,95	0,46	275 016
25	Kab. Batang	87,5	11,96	1,93	0,49	208 671
26	Kab. Pekalongan	116,5	13,51	1,96	0,39	293 039
27	Kab. Pemasang	246,8	19,27	2,71	0,61	271 861
28	Kab. Tegal	149,8	10,58	1,68	0,42	258 366
29	Kab. Brebes	367,9	20,82	3,33	0,76	307 238
30	Kota Magelang	11,8	9,80	1,45	0,37	350 554
31	Kota Surakarta	59,7	11,74	1,63	0,34	371 918
32	Kota Salatiga	11,5	6,40	0,94	0,18	302 884
33	Kota Semarang	86,7	5,25	0,65	0,13	328 271
34	Kota Pekalongan	24,1	8,26	0,93	0,16	322 313
35	Kota Tegal	21,6	8,84	0,94	0,18	333 553
Provinsi Jawa Tengah		4 811,3	14,44	2,37	0,59	261 881

Keterangan: ¹⁾ Backcasting dengan penimbang hasil proyeksi SP2010

Tabel 7
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1),
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dan Garis Kemiskinan
menurut Kabupaten/Kota, September 2014

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)	Persentase Penduduk Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kab. Cilacap	239,75	14,21	2,37	0,61	265 714
2	Kab. Banyumas	283,48	17,45	2,48	0,56	309 106
3	Kab. Purbalingga	176,04	19,75	3,26	0,80	275 022
4	Kab. Banjarnegara	159,48	17,77	2,88	0,73	229 718
5	Kab. Kebumen	242,31	20,50	2,78	0,61	277 280
6	Kab. Purworejo	102,11	14,41	1,85	0,42	284 409
7	Kab. Wonosobo	165,83	21,42	3,91	1,09	267 548
8	Kab. Magelang	160,48	12,98	2,07	0,47	246 292
9	Kab. Boyolali	118,58	12,36	1,62	0,32	255 391
10	Kab. Klaten	168,18	14,56	2,02	0,45	327 231
11	Kab. Sukoharjo	78,85	9,18	0,76	0,14	291 949
12	Kab. Wonogiri	123,85	13,09	1,65	0,34	244 761
13	Kab. Karanganyar	107,29	12,62	2,02	0,48	288 814
14	Kab. Sragen	130,28	14,87	2,04	0,45	255 550
15	Kab. Grobogan	186,53	13,86	2,33	0,59	290 827
16	Kab. Blora	115,98	13,66	2,09	0,50	248 903
17	Kab. Rembang	119,99	19,50	2,90	0,65	299 503
18	Kab. Pati	148,05	12,06	1,54	0,32	332 228
19	Kab. Kudus	65,80	7,99	0,90	0,15	314 211
20	Kab. Jepara	100,48	8,55	1,17	0,23	299 914
21	Kab. Demak	161,95	14,60	1,90	0,40	315 570
22	Kab. Semarang	79,76	8,05	1,20	0,29	275 612
23	Kab. Temanggung	85,53	11,55	1,51	0,30	240 845
24	Kab. Kendal	110,48	11,80	1,76	0,41	289 486
25	Kab. Batang	82,12	11,13	1,43	0,29	216 952
26	Kab. Pekalongan	109,27	12,57	1,79	0,42	306 281
27	Kab. Pemasang	236,98	18,44	2,49	0,53	287 358
28	Kab. Tegal	140,31	9,87	1,33	0,32	271 875
29	Kab. Brebes	355,12	20,00	2,93	0,66	327 452
30	Kota Magelang	11,02	9,14	0,94	0,20	376 143
31	Kota Surakarta	55,92	10,95	1,48	0,30	385 467
32	Kota Salatiga	10,79	5,93	0,87	0,21	320 204
33	Kota Semarang	84,68	5,04	0,47	0,08	348 824
34	Kota Pekalongan	23,62	8,02	1,14	0,26	338 398
35	Kota Tegal	20,94	8,54	1,38	0,38	353 301
Provinsi Jawa Tengah		4 561,83	13,58	2,09	0,51	281 570

Tabel 8
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1),
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dan Garis Kemiskinan
menurut Kabupaten/Kota, Maret 2015

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)	Persentase Penduduk Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kab. Cilacap	243,47	14,39	2,71	0,76	273 828
2	Kab. Banyumas	285,85	17,52	2,91	0,71	320 585
3	Kab. Purbalingga	176,49	19,70	3,37	0,85	283 366
4	Kab. Banjarnegara	165,36	18,37	3,51	0,93	236 399
5	Kab. Kebumen	241,94	20,44	4,08	1,19	292 177
6	Kab. Purworejo	101,25	14,27	2,43	0,63	294 158
7	Kab. Wonosobo	166,41	21,45	4,74	1,60	275 180
8	Kab. Magelang	162,38	13,07	1,60	0,32	253 866
9	Kab. Boyolali	119,97	12,45	2,01	0,50	263 734
10	Kab. Klaten	172,30	14,89	2,72	0,72	340 484
11	Kab. Sukoharjo	79,94	9,26	1,09	0,25	303 030
12	Kab. Wonogiri	122,98	12,98	2,10	0,50	252 903
13	Kab. Karanganyar	106,43	12,46	1,82	0,40	303 056
14	Kab. Sragen	130,42	14,86	2,69	0,76	263 199
15	Kab. Grobogan	184,49	13,68	2,56	0,65	303 455
16	Kab. Blora	115,05	13,52	2,08	0,54	257 581
17	Kab. Rembang	119,11	19,28	3,47	0,99	314 596
18	Kab. Pati	147,05	11,95	2,02	0,55	347 575
19	Kab. Kudus	64,10	7,73	0,90	0,17	328 404
20	Kab. Jepara	100,61	8,50	1,28	0,28	314 422
21	Kab. Demak	160,89	14,44	2,32	0,60	328 529
22	Kab. Semarang	81,25	8,15	1,33	0,30	286 918
23	Kab. Temanggung	87,45	11,76	1,99	0,47	248 866
24	Kab. Kendal	109,27	11,62	2,17	0,57	301 449
25	Kab. Batang	83,53	11,27	1,80	0,43	224 437
26	Kab. Pekalongan	112,07	12,84	1,98	0,46	317 796
27	Kab. Pemasang	235,53	18,30	3,93	1,24	298 622
28	Kab. Tegal	143,54	10,09	1,50	0,36	282 861
29	Kab. Brebes	352,01	19,79	3,52	0,93	340 538
30	Kota Magelang	10,92	9,05	1,39	0,31	405 228
31	Kota Surakarta	55,71	10,89	1,74	0,40	406 840
32	Kota Salatiga	10,62	5,80	1,07	0,26	337 511
33	Kota Semarang	84,27	4,97	0,50	0,09	368 477
34	Kota Pekalongan	24,06	8,09	0,83	0,15	352 717
35	Kota Tegal	20,31	8,26	1,34	0,35	371 528
Provinsi Jawa Tengah		4 577,04	13,58	2,44	0,65	297 851

Tabel 9
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1),
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dan Garis Kemiskinan
menurut Kabupaten/Kota, Maret 2016

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)	Persentase Penduduk Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kab. Cilacap	240,24	14,12	2,58	0,70	292 525
2	Kab. Banyumas	283,90	17,23	3,08	0,85	344 514
3	Kab. Purbalingga	171,78	18,98	3,85	1,20	301 862
4	Kab. Banjarnegara	158,20	17,46	3,03	0,80	252 328
5	Kab. Kebumen	235,90	19,86	3,78	1,11	313 881
6	Kab. Purworejo	99,07	13,91	2,67	0,76	313 931
7	Kab. Wonosobo	160,12	20,53	4,02	1,11	297 422
8	Kab. Magelang	158,86	12,67	1,84	0,44	271 800
9	Kab. Boyolali	116,98	12,09	2,56	0,81	283 921
10	Kab. Klaten	168,01	14,46	2,70	0,71	364 240
11	Kab. Sukoharjo	78,91	9,07	1,36	0,29	327 217
12	Kab. Wonogiri	124,83	13,12	1,68	0,38	275 507
13	Kab. Karanganyar	107,66	12,49	2,09	0,51	329 531
14	Kab. Sragen	126,76	14,38	2,92	0,99	283 649
15	Kab. Grobogan	184,14	13,57	1,78	0,38	333 009
16	Kab. Blora	113,94	13,33	2,17	0,54	279 972
17	Kab. Rembang	115,49	18,54	3,28	0,85	338 986
18	Kab. Pati	144,20	11,65	1,99	0,49	377 442
19	Kab. Kudus	64,19	7,65	1,07	0,21	356 951
20	Kab. Jepara	100,32	8,35	0,68	0,10	341 754
21	Kab. Demak	158,84	14,10	2,20	0,56	356 919
22	Kab. Semarang	80,72	7,99	1,57	0,45	307 505
23	Kab. Temanggung	87,09	11,60	1,70	0,39	268 730
24	Kab. Kendal	107,81	11,37	2,13	0,61	323 078
25	Kab. Batang	82,56	11,04	1,65	0,39	240 541
26	Kab. Pekalongan	113,31	12,90	1,94	0,49	341 648
27	Kab. Pemasang	227,08	17,58	3,04	0,80	319 434
28	Kab. Tegal	144,22	10,10	1,03	0,21	308 270
29	Kab. Brebes	347,98	19,47	3,96	1,16	364 059
30	Kota Magelang	10,64	8,79	1,20	0,23	425 191
31	Kota Surakarta	55,91	10,88	1,34	0,35	430 293
32	Kota Salatiga	9,73	5,24	0,60	0,11	345 146
33	Kota Semarang	83,59	4,85	0,76	0,18	382 160
34	Kota Pekalongan	23,65	7,92	0,80	0,13	375 600
35	Kota Tegal	20,26	8,20	1,04	0,21	395 631
Provinsi Jawa Tengah		4 506,89	13,27	2,37	0,63	317 348

Tabel 10
Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, September 2012

No	Kabupaten/Kota	Pendidikan			
		< SD	Tamat SD / SLTP	SLTA +	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Cilacap	39,49	54,39	6,12	100,00
2	Kab. Banyumas	31,57	57,72	10,71	100,00
3	Kab. Purbalingga	36,91	56,06	7,02	100,00
4	Kab. Banjarnegara	45,82	52,11	2,06	100,00
5	Kab. Kebumen	32,17	60,64	7,20	100,00
6	Kab. Purworejo	24,55	65,56	9,88	100,00
7	Kab. Wonosobo	41,73	54,47	3,80	100,00
8	Kab. Magelang	27,20	68,29	4,52	100,00
9	Kab. Boyolali	38,56	49,80	11,64	100,00
10	Kab. Klaten	32,14	47,15	20,71	100,00
11	Kab. Sukoharjo	32,05	55,61	12,34	100,00
12	Kab. Wonogiri	33,93	56,07	9,99	100,00
13	Kab. Karanganyar	25,69	60,36	13,95	100,00
14	Kab. Sragen	36,98	52,30	10,72	100,00
15	Kab. Grobogan	35,04	60,75	4,21	100,00
16	Kab. Blora	47,44	49,86	2,70	100,00
17	Kab. Rembang	27,45	61,96	10,59	100,00
18	Kab. Pati	32,63	55,90	11,47	100,00
19	Kab. Kudus	24,55	51,17	24,28	100,00
20	Kab. Jepara	29,44	64,29	6,27	100,00
21	Kab. Demak	26,31	62,68	11,01	100,00
22	Kab. Semarang	42,27	51,09	6,64	100,00
23	Kab. Temanggung	35,34	60,77	3,89	100,00
24	Kab. Kendal	38,83	56,74	4,44	100,00
25	Kab. Batang	37,95	60,39	1,66	100,00
26	Kab. Pekalongan	29,72	62,86	7,42	100,00
27	Kab. Pemalang	29,67	66,65	3,68	100,00
28	Kab. Tegal	40,85	54,23	4,92	100,00
29	Kab. Brebes	40,49	55,33	4,18	100,00
30	Kota Magelang	11,64	58,62	29,73	100,00
31	Kota Surakarta	14,45	52,76	32,79	100,00
32	Kota Salatiga	34,44	45,04	20,51	100,00
33	Kota Semarang	21,93	48,12	29,95	100,00
34	Kota Pekalongan	24,29	60,73	14,98	100,00
35	Kota Tegal	29,38	53,40	17,23	100,00
Provinsi Jawa Tengah		34,09	57,24	8,66	100,00

Tabel 11
Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, September 2013

No	Kabupaten/Kota	Pendidikan			
		< SD	Tamat SD / SLTP	SLTA +	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Cilacap	40,88	48,54	10,57	100,00
2	Kab. Banyumas	27,79	63,57	8,63	100,00
3	Kab. Purbalingga	41,07	52,50	6,43	100,00
4	Kab. Banjarnegara	42,61	55,38	2,00	100,00
5	Kab. Kebumen	34,36	60,08	5,56	100,00
6	Kab. Purworejo	23,83	58,97	17,20	100,00
7	Kab. Wonosobo	40,63	57,77	1,60	100,00
8	Kab. Magelang	34,94	59,34	5,72	100,00
9	Kab. Boyolali	37,80	53,95	8,25	100,00
10	Kab. Klaten	30,26	48,05	21,69	100,00
11	Kab. Sukoharjo	23,85	50,10	26,05	100,00
12	Kab. Wonogiri	39,30	56,53	4,17	100,00
13	Kab. Karanganyar	26,87	60,06	13,07	100,00
14	Kab. Sragen	34,02	50,48	15,51	100,00
15	Kab. Grobogan	35,13	61,59	3,28	100,00
16	Kab. Blora	50,54	42,69	6,76	100,00
17	Kab. Rembang	25,29	66,16	8,56	100,00
18	Kab. Pati	41,10	46,13	12,77	100,00
19	Kab. Kudus	24,17	57,80	18,03	100,00
20	Kab. Jepara	31,10	60,20	8,69	100,00
21	Kab. Demak	24,29	67,22	8,30	100,00
22	Kab. Semarang	38,01	46,38	15,62	100,00
23	Kab. Temanggung	41,26	52,86	5,88	100,00
24	Kab. Kendal	41,60	51,47	6,92	100,00
25	Kab. Batang	43,70	52,73	3,57	100,00
26	Kab. Pekalongan	35,16	59,92	4,91	100,00
27	Kab. Pemalang	37,14	52,95	9,92	100,00
28	Kab. Tegal	27,94	65,92	6,14	100,00
29	Kab. Brebes	44,88	50,53	4,59	100,00
30	Kota Magelang	9,25	54,32	36,43	100,00
31	Kota Surakarta	18,43	48,31	33,25	100,00
32	Kota Salatiga	23,62	46,77	29,61	100,00
33	Kota Semarang	10,11	53,32	36,57	100,00
34	Kota Pekalongan	24,18	56,62	19,21	100,00
35	Kota Tegal	33,11	58,00	8,89	100,00
Provinsi Jawa Tengah		35,01	55,45	9,54	100,00

Tabel 12
Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, September 2014

No	Kabupaten/Kota	Pendidikan			
		< SD	Tamat SD / SLTP	SLTA +	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Cilacap	36,81	58,01	5,18	100,00
2	Kab. Banyumas	28,30	59,11	12,59	100,00
3	Kab. Purbalingga	43,72	51,15	5,13	100,00
4	Kab. Banjarnegara	31,58	65,31	3,11	100,00
5	Kab. Kebumen	27,05	62,23	10,72	100,00
6	Kab. Purworejo	31,82	56,77	11,41	100,00
7	Kab. Wonosobo	46,79	47,55	5,66	100,00
8	Kab. Magelang	29,89	60,16	9,95	100,00
9	Kab. Boyolali	37,62	49,80	12,57	100,00
10	Kab. Klaten	32,55	42,80	24,66	100,00
11	Kab. Sukoharjo	25,14	52,27	22,59	100,00
12	Kab. Wonogiri	37,65	54,39	7,95	100,00
13	Kab. Karanganyar	30,42	59,84	9,74	100,00
14	Kab. Sragen	40,81	41,37	17,82	100,00
15	Kab. Grobogan	28,54	64,05	7,42	100,00
16	Kab. Blora	45,27	45,63	9,10	100,00
17	Kab. Rembang	24,16	64,64	11,20	100,00
18	Kab. Pati	40,15	51,38	8,47	100,00
19	Kab. Kudus	27,22	50,99	21,79	100,00
20	Kab. Jepara	28,30	60,02	11,68	100,00
21	Kab. Demak	27,74	59,85	12,41	100,00
22	Kab. Semarang	38,90	49,43	11,68	100,00
23	Kab. Temanggung	42,44	50,25	7,30	100,00
24	Kab. Kendal	36,48	55,97	7,55	100,00
25	Kab. Batang	44,16	54,11	1,72	100,00
26	Kab. Pekalongan	29,51	65,75	4,74	100,00
27	Kab. Pemalang	27,25	64,80	7,94	100,00
28	Kab. Tegal	38,41	54,03	7,56	100,00
29	Kab. Brebes	38,61	53,16	8,23	100,00
30	Kota Magelang	17,51	55,95	26,54	100,00
31	Kota Surakarta	20,27	50,06	29,67	100,00
32	Kota Salatiga	21,41	56,80	21,79	100,00
33	Kota Semarang	25,47	47,60	26,93	100,00
34	Kota Pekalongan	20,64	67,55	11,82	100,00
35	Kota Tegal	22,11	63,66	14,23	100,00
Provinsi Jawa Tengah		33,69	55,78	10,52	100,00

Tabel 13
Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Maret 2015

No	Kabupaten/Kota	Pendidikan			
		< SD	Tamat SD / SLTP	SLTA +	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Cilacap	34,27	59,49	6,23	100,00
2	Kab. Banyumas	37,89	54,69	7,41	100,00
3	Kab. Purbalingga	36,36	57,87	5,77	100,00
4	Kab. Banjarnegara	34,74	62,75	2,51	100,00
5	Kab. Kebumen	26,17	63,65	10,18	100,00
6	Kab. Purworejo	29,43	56,81	13,77	100,00
7	Kab. Wonosobo	40,34	59,03	0,62	100,00
8	Kab. Magelang	28,12	63,32	8,56	100,00
9	Kab. Boyolali	35,60	56,29	8,11	100,00
10	Kab. Klaten	36,43	44,41	19,16	100,00
11	Kab. Sukoharjo	27,96	51,18	20,86	100,00
12	Kab. Wonogiri	36,98	50,19	12,84	100,00
13	Kab. Karanganyar	35,21	50,74	14,05	100,00
14	Kab. Sragen	42,29	44,03	13,68	100,00
15	Kab. Grobogan	30,38	64,43	5,20	100,00
16	Kab. Blora	49,15	45,15	5,70	100,00
17	Kab. Rembang	31,88	57,94	10,18	100,00
18	Kab. Pati	36,42	48,67	14,91	100,00
19	Kab. Kudus	23,91	61,02	15,07	100,00
20	Kab. Jepara	44,06	42,30	13,64	100,00
21	Kab. Demak	33,22	58,13	8,65	100,00
22	Kab. Semarang	36,06	54,98	8,96	100,00
23	Kab. Temanggung	40,21	55,22	4,57	100,00
24	Kab. Kendal	41,98	52,79	5,23	100,00
25	Kab. Batang	39,17	54,63	6,20	100,00
26	Kab. Pekalongan	22,77	70,67	6,55	100,00
27	Kab. Pemalang	43,44	50,27	6,30	100,00
28	Kab. Tegal	38,67	52,69	8,64	100,00
29	Kab. Brebes	42,24	53,20	4,56	100,00
30	Kota Magelang	14,44	54,04	31,52	100,00
31	Kota Surakarta	13,70	49,47	36,83	100,00
32	Kota Salatiga	9,38	59,51	31,11	100,00
33	Kota Semarang	22,73	41,06	36,21	100,00
34	Kota Pekalongan	24,02	60,04	15,94	100,00
35	Kota Tegal	33,95	50,04	16,01	100,00
Provinsi Jawa Tengah		35,47	54,97	9,56	100,00

Tabel 14
Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Maret 2016

No	Kabupaten/Kota	Pendidikan			
		< SD	Tamat SD / SLTP	SLTA +	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Cilacap	36,18	54,09	9,73	100,00
2	Kab. Banyumas	23,85	61,62	14,53	100,00
3	Kab. Purbalingga	38,12	55,13	6,75	100,00
4	Kab. Banjarnegara	36,22	58,36	5,42	100,00
5	Kab. Kebumen	22,19	62,53	15,28	100,00
6	Kab. Purworejo	30,99	56,48	12,53	100,00
7	Kab. Wonosobo	38,91	58,51	2,58	100,00
8	Kab. Magelang	28,92	61,46	9,62	100,00
9	Kab. Boyolali	38,09	52,54	9,37	100,00
10	Kab. Klaten	25,13	46,90	27,97	100,00
11	Kab. Sukoharjo	17,06	58,55	24,39	100,00
12	Kab. Wonogiri	40,56	48,54	10,90	100,00
13	Kab. Karanganyar	30,40	59,11	10,49	100,00
14	Kab. Sragen	40,47	43,72	15,81	100,00
15	Kab. Grobogan	25,56	67,12	7,32	100,00
16	Kab. Blora	40,96	50,66	8,38	100,00
17	Kab. Rembang	27,81	56,30	15,89	100,00
18	Kab. Pati	35,88	53,88	10,24	100,00
19	Kab. Kudus	27,66	58,52	13,81	100,00
20	Kab. Jepara	22,37	61,54	16,09	100,00
21	Kab. Demak	26,98	51,50	11,52	100,00
22	Kab. Semarang	34,35	54,41	11,24	100,00
23	Kab. Temanggung	34,01	58,68	7,31	100,00
24	Kab. Kendal	41,95	48,05	9,99	100,00
25	Kab. Batang	34,14	59,44	6,42	100,00
26	Kab. Pekalongan	26,54	64,46	9,00	100,00
27	Kab. Pemalang	29,68	61,79	8,53	100,00
28	Kab. Tegal	34,02	56,74	9,24	100,00
29	Kab. Brebes	32,02	57,27	10,70	100,00
30	Kota Magelang	29,41	48,93	21,67	100,00
31	Kota Surakarta	14,36	47,17	38,47	100,00
32	Kota Salatiga	13,99	53,11	32,90	100,00
33	Kota Semarang	22,71	47,81	29,48	100,00
34	Kota Pekalongan	12,81	67,98	19,21	100,00
35	Kota Tegal	24,18	61,43	14,38	100,00
Provinsi Jawa Tengah		30,96	56,94	12,10	100,00

Tabel 15
Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Miskin
menurut Kabupaten/Kota dan Golongan Umur, September 2012

No	Kabupaten/Kota	Angka Melek Huruf		Angka Partisipasi Sekolah	
		15 - 24 Tahun	15 - 55 Tahun	7 - 12 Tahun	13 - 15 Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Cilacap	100,00	93,20	96,15	88,09
2	Kab. Banyumas	100,00	95,30	95,34	71,71
3	Kab. Purbalingga	100,00	97,27	94,42	74,75
4	Kab. Banjarnegara	95,98	88,80	95,10	65,87
5	Kab. Kebumen	98,27	93,11	98,36	93,11
6	Kab. Purworejo	100,00	97,27	100,00	76,33
7	Kab. Wonosobo	98,80	92,13	96,97	69,40
8	Kab. Magelang	100,00	96,49	100,00	62,93
9	Kab. Boyolali	100,00	90,58	100,00	68,31
10	Kab. Klaten	100,00	92,73	100,00	80,12
11	Kab. Sukoharjo	100,00	93,01	100,00	71,77
12	Kab. Wonogiri	100,00	96,25	100,00	74,76
13	Kab. Karanganyar	100,00	93,94	97,47	78,73
14	Kab. Sragen	100,00	86,57	100,00	100,00
15	Kab. Grobogan	100,00	95,51	98,41	77,29
16	Kab. Blora	96,84	87,13	96,41	84,04
17	Kab. Rembang	98,81	95,06	98,69	95,23
18	Kab. Pati	97,41	91,52	92,60	74,05
19	Kab. Kudus	100,00	93,91	95,06	100,00
20	Kab. Jepara	100,00	95,86	100,00	73,98
21	Kab. Demak	98,58	94,62	97,21	80,11
22	Kab. Semarang	100,00	92,10	100,00	75,49
23	Kab. Temanggung	100,00	94,50	97,16	83,81
24	Kab. Kendal	100,00	89,83	100,00	81,56
25	Kab. Batang	100,00	96,07	100,00	61,22
26	Kab. Pekalongan	100,00	96,17	98,38	87,54
27	Kab. Pemalang	100,00	96,64	98,88	82,22
28	Kab. Tegal	100,00	94,08	94,92	71,87
29	Kab. Brebes	99,37	88,64	97,42	67,86
30	Kota Magelang	93,88	98,10	100,00	84,25
31	Kota Surakarta	100,00	95,15	100,00	91,30
32	Kota Salatiga	100,00	85,11	100,00	75,60
33	Kota Semarang	100,00	96,46	100,00	71,33
34	Kota Pekalongan	100,00	91,80	91,34	63,53
35	Kota Tegal	100,00	93,56	83,36	71,50
Provinsi Jawa Tengah		99,41	93,24	97,57	77,70

Tabel 16
Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Miskin
menurut Kabupaten/Kota dan Golongan Umur, September 2013

No	Kabupaten/Kota	Angka Melek Huruf		Angka Partisipasi Sekolah	
		15 - 24 Tahun	15 - 55 Tahun	7 - 12 Tahun	13 - 15 Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Cilacap	100,00	92,68	100,00	63,07
2	Kab. Banyumas	98,88	98,24	98,58	84,31
3	Kab. Purbalingga	100,00	91,59	97,94	68,54
4	Kab. Banjarnegara	98,12	84,24	100,00	60,68
5	Kab. Kebumen	97,15	95,31	97,27	89,50
6	Kab. Purworejo	100,00	94,49	97,28	90,82
7	Kab. Wonosobo	100,00	91,34	94,08	59,91
8	Kab. Magelang	100,00	96,04	98,06	69,75
9	Kab. Boyolali	96,91	89,84	97,77	100,00
10	Kab. Klaten	100,00	95,99	98,52	100,00
11	Kab. Sukoharjo	100,00	98,32	100,00	64,47
12	Kab. Wonogiri	88,18	87,58	95,91	71,94
13	Kab. Karanganyar	100,00	93,27	100,00	79,66
14	Kab. Sragen	100,00	91,94	100,00	96,85
15	Kab. Grobogan	93,71	89,04	89,44	89,02
16	Kab. Blora	96,16	84,45	99,08	100,00
17	Kab. Rembang	100,00	96,54	96,86	92,22
18	Kab. Pati	93,80	86,23	100,00	100,00
19	Kab. Kudus	100,00	95,29	100,00	81,10
20	Kab. Jepara	100,00	94,79	100,00	89,24
21	Kab. Demak	97,30	89,63	100,00	82,51
22	Kab. Semarang	96,47	91,88	100,00	70,03
23	Kab. Temanggung	100,00	90,00	100,00	86,61
24	Kab. Kendal	92,24	92,03	97,09	92,27
25	Kab. Batang	100,00	88,98	100,00	60,49
26	Kab. Pekalongan	100,00	94,02	97,89	75,16
27	Kab. Pemalang	97,30	93,39	92,64	80,11
28	Kab. Tegal	100,00	94,82	97,09	87,26
29	Kab. Brebes	99,56	92,20	96,23	79,86
30	Kota Magelang	97,05	98,50	100,00	88,11
31	Kota Surakarta	100,00	98,78	100,00	100,00
32	Kota Salatiga	86,30	87,45	100,00	100,00
33	Kota Semarang	100,00	97,57	100,00	100,00
34	Kota Pekalongan	100,00	96,68	100,00	97,81
35	Kota Tegal	100,00	94,29	97,21	100,00
Provinsi Jawa Tengah		98,35	92,59	97,59	82,93

Tabel 17
Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Miskin
menurut Kabupaten/Kota dan Golongan Umur, September 2014

No	Kabupaten/Kota	Angka Melek Huruf		Angka Partisipasi Sekolah	
		15 - 24 Tahun	15 - 55 Tahun	7 - 12 Tahun	13 - 15 Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Cilacap	100,00	97,72	100,00	75,57
2	Kab. Banyumas	100,00	99,20	100,00	93,26
3	Kab. Purbalingga	100,00	95,53	100,00	90,69
4	Kab. Banjarnegara	100,00	95,99	100,00	66,21
5	Kab. Kebumen	100,00	98,18	100,00	96,12
6	Kab. Purworejo	100,00	98,41	100,00	87,38
7	Kab. Wonosobo	100,00	97,18	100,00	65,78
8	Kab. Magelang	100,00	97,61	100,00	83,32
9	Kab. Boyolali	100,00	96,21	100,00	92,41
10	Kab. Klaten	100,00	97,27	98,47	100,00
11	Kab. Sukoharjo	100,00	97,59	100,00	100,00
12	Kab. Wonogiri	100,00	94,66	100,00	100,00
13	Kab. Karanganyar	100,00	93,39	100,00	100,00
14	Kab. Sragen	100,00	93,84	96,41	96,11
15	Kab. Grobogan	100,00	97,03	100,00	94,79
16	Kab. Blora	98,23	92,74	100,00	95,36
17	Kab. Rembang	100,00	95,76	100,00	100,00
18	Kab. Pati	100,00	91,57	96,16	100,00
19	Kab. Kudus	100,00	96,81	100,00	100,00
20	Kab. Jepara	100,00	97,94	100,00	94,44
21	Kab. Demak	100,00	95,72	99,03	81,34
22	Kab. Semarang	100,00	97,05	100,00	89,52
23	Kab. Temanggung	100,00	96,56	100,00	65,57
24	Kab. Kendal	100,00	94,70	100,00	88,15
25	Kab. Batang	100,00	92,14	100,00	82,42
26	Kab. Pekalongan	100,00	97,80	100,00	85,00
27	Kab. Pemalang	100,00	93,77	100,00	83,42
28	Kab. Tegal	100,00	96,72	96,87	78,68
29	Kab. Brebes	100,00	94,64	98,25	88,15
30	Kota Magelang	100,00	100,00	100,00	100,00
31	Kota Surakarta	100,00	99,44	100,00	94,17
32	Kota Salatiga	100,00	96,95	100,00	100,00
33	Kota Semarang	100,00	99,59	100,00	100,00
34	Kota Pekalongan	100,00	98,10	100,00	65,41
35	Kota Tegal	100,00	99,33	100,00	94,82
Provinsi Jawa Tengah		99,96	96,21	99,44	88,25

Tabel 18
Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Miskin
menurut Kabupaten/Kota dan Golongan Umur, Maret 2015

No	Kabupaten/Kota	Angka Melek Huruf		Angka Partisipasi Sekolah	
		15 - 24 Tahun	15 - 55 Tahun	7 - 12 Tahun	13 - 15 Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Cilacap	100,00	97,65	100,00	95,45
2	Kab. Banyumas	100,00	99,71	96,31	63,72
3	Kab. Purbalingga	100,00	99,02	98,94	82,76
4	Kab. Banjarnegara	100,00	97,47	100,00	82,80
5	Kab. Kebumen	100,00	98,44	100,00	93,64
6	Kab. Purworejo	97,04	97,84	100,00	93,62
7	Kab. Wonosobo	100,00	97,20	100,00	79,24
8	Kab. Magelang	100,00	97,81	97,82	95,64
9	Kab. Boyolali	98,40	94,97	100,00	100,00
10	Kab. Klaten	100,00	96,66	100,00	100,00
11	Kab. Sukoharjo	100,00	97,04	100,00	100,00
12	Kab. Wonogiri	100,00	94,13	100,00	91,82
13	Kab. Karanganyar	100,00	94,78	96,31	100,00
14	Kab. Sragen	100,00	92,25	96,93	100,00
15	Kab. Grobogan	100,00	98,60	98,23	100,00
16	Kab. Blora	100,00	89,79	100,00	70,52
17	Kab. Rembang	100,00	97,29	100,00	96,67
18	Kab. Pati	100,00	96,58	100,00	93,39
19	Kab. Kudus	100,00	96,82	100,00	93,08
20	Kab. Jepara	100,00	96,80	97,60	100,00
21	Kab. Demak	100,00	95,67	100,00	100,00
22	Kab. Semarang	100,00	97,49	100,00	100,00
23	Kab. Temanggung	100,00	97,26	100,00	100,00
24	Kab. Kendal	100,00	93,86	100,00	86,79
25	Kab. Batang	100,00	95,88	100,00	93,00
26	Kab. Pekalongan	100,00	99,54	100,00	91,66
27	Kab. Pemalang	100,00	97,26	100,00	81,32
28	Kab. Tegal	100,00	98,17	96,77	94,74
29	Kab. Brebes	100,00	94,27	99,32	88,20
30	Kota Magelang	100,00	99,00	93,80	100,00
31	Kota Surakarta	100,00	98,53	100,00	100,00
32	Kota Salatiga	100,00	100,00	100,00	100,00
33	Kota Semarang	100,00	98,56	100,00	97,92
34	Kota Pekalongan	100,00	100,00	94,13	100,00
35	Kota Tegal	100,00	97,71	100,00	92,19
Provinsi Jawa Tengah		99,89	96,87	99,16	90,80

Tabel 19
Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Miskin
menurut Kabupaten/Kota dan Golongan Umur, Maret 2016

No	Kabupaten/Kota	Angka Melek Huruf		Angka Partisipasi Sekolah	
		15 - 24 Tahun	15 - 55 Tahun	7 - 12 Tahun	13 - 15 Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Cilacap	100,00	99,14	100,00	94,57
2	Kab. Banyumas	100,00	96,97	100,00	93,43
3	Kab. Purbalingga	100,00	96,67	100,00	88,11
4	Kab. Banjarnegara	98,82	96,92	97,80	80,65
5	Kab. Kebumen	100,00	98,82	100,00	91,97
6	Kab. Purworejo	97,91	96,44	100,00	87,84
7	Kab. Wonosobo	100,00	95,41	100,00	100,00
8	Kab. Magelang	100,00	100,00	100,00	95,19
9	Kab. Boyolali	100,00	94,12	100,00	94,35
10	Kab. Klaten	100,00	99,17	100,00	100,00
11	Kab. Sukoharjo	100,00	97,17	100,00	100,00
12	Kab. Wonogiri	100,00	97,23	100,00	100,00
13	Kab. Karanganyar	100,00	91,68	100,00	92,34
14	Kab. Sragen	100,00	92,06	98,82	78,60
15	Kab. Grobogan	100,00	95,56	100,00	85,55
16	Kab. Blora	100,00	93,13	100,00	100,00
17	Kab. Rembang	97,72	98,88	100,00	100,00
18	Kab. Pati	100,00	99,20	100,00	75,08
19	Kab. Kudus	96,87	96,98	100,00	100,00
20	Kab. Jepara	100,00	99,26	100,00	81,03
21	Kab. Demak	100,00	96,63	100,00	88,59
22	Kab. Semarang	100,00	94,92	100,00	81,37
23	Kab. Temanggung	100,00	98,35	100,00	88,21
24	Kab. Kendal	98,57	98,16	96,51	86,93
25	Kab. Batang	100,00	97,12	100,00	91,62
26	Kab. Pekalongan	100,00	97,59	100,00	76,05
27	Kab. Pemasang	100,00	97,27	99,53	89,83
28	Kab. Tegal	100,00	96,71	100,00	94,51
29	Kab. Brebes	100,00	96,41	100,00	90,59
30	Kota Magelang	100,00	97,72	100,00	100,00
31	Kota Surakarta	100,00	100,00	96,11	95,84
32	Kota Salatiga	100,00	100,00	100,00	100,00
33	Kota Semarang	100,00	98,04	100,00	94,11
34	Kota Pekalongan	100,00	100,00	100,00	100,00
35	Kota Tegal	100,00	98,21	100,00	100,00
Provinsi Jawa Tengah		99,77	97,07	99,73	90,50

Tabel 20
Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas
menurut Kabupaten/Kota dan Sektor Bekerja, September 2012

No	Kabupaten/Kota	Tidak Bekerja *)	Sektor Bekerja		Total
			Bekerja di Sektor Pertanian	Bekerja Bukan di Sektor Pertanian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Cilacap	39,57	24,86	35,57	100,00
2	Kab. Banyumas	38,61	23,04	38,35	100,00
3	Kab. Purbalingga	31,91	19,18	48,91	100,00
4	Kab. Banjarnegara	27,88	53,05	19,08	100,00
5	Kab. Kebumen	33,53	25,33	41,14	100,00
6	Kab. Purworejo	31,14	41,53	27,33	100,00
7	Kab. Wonosobo	27,95	48,98	23,07	100,00
8	Kab. Magelang	26,07	39,42	34,51	100,00
9	Kab. Boyolali	20,67	48,66	30,68	100,00
10	Kab. Klaten	29,03	19,30	51,67	100,00
11	Kab. Sukoharjo	43,16	10,43	46,41	100,00
12	Kab. Wonogiri	27,38	46,06	26,55	100,00
13	Kab. Karanganyar	27,97	37,20	34,83	100,00
14	Kab. Sragen	30,85	44,94	24,21	100,00
15	Kab. Grobogan	29,83	47,28	22,88	100,00
16	Kab. Blora	33,86	51,45	14,69	100,00
17	Kab. Rembang	32,38	39,39	28,23	100,00
18	Kab. Pati	36,31	37,99	25,70	100,00
19	Kab. Kudus	30,53	12,53	56,94	100,00
20	Kab. Jepara	33,16	13,15	53,68	100,00
21	Kab. Demak	41,55	31,01	27,45	100,00
22	Kab. Semarang	31,81	36,79	31,40	100,00
23	Kab. Temanggung	27,37	44,99	27,63	100,00
24	Kab. Kendal	34,03	42,07	23,91	100,00
25	Kab. Batang	40,49	26,60	32,91	100,00
26	Kab. Pekalongan	32,07	17,19	50,74	100,00
27	Kab. Pemalang	43,37	34,50	22,13	100,00
28	Kab. Tegal	46,31	20,66	33,04	100,00
29	Kab. Brebes	41,87	30,23	27,90	100,00
30	Kota Magelang	43,79	0,00	56,21	100,00
31	Kota Surakarta	33,81	0,00	66,19	100,00
32	Kota Salatiga	44,40	8,25	47,35	100,00
33	Kota Semarang	28,05	0,00	71,95	100,00
34	Kota Pekalongan	32,88	7,04	60,08	100,00
35	Kota Tegal	37,61	5,98	56,40	100,00
Provinsi Jawa Tengah		34,16	31,92	33,92	100,00

Catatan : *) Termasuk pengangguran dan bukan angkatan kerja

Tabel 21
Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas
menurut Kabupaten/Kota dan Sektor Bekerja, September 2013

No	Kabupaten/Kota	Tidak Bekerja *)	Sektor Bekerja		Total
			Bekerja di Sektor Pertanian	Bekerja Bukan di Sektor Pertanian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Cilacap	43,64	22,78	33,58	100,00
2	Kab. Banyumas	38,40	21,18	40,41	100,00
3	Kab. Purbalingga	33,63	21,56	44,81	100,00
4	Kab. Banjarnegara	21,50	62,81	15,69	100,00
5	Kab. Kebumen	43,62	23,93	32,44	100,00
6	Kab. Purworejo	41,77	31,71	26,52	100,00
7	Kab. Wonosobo	26,09	49,76	24,15	100,00
8	Kab. Magelang	30,30	40,75	28,95	100,00
9	Kab. Boyolali	21,96	55,32	22,73	100,00
10	Kab. Klaten	38,23	19,42	42,34	100,00
11	Kab. Sukoharjo	35,90	18,10	46,00	100,00
12	Kab. Wonogiri	34,10	50,60	15,29	100,00
13	Kab. Karanganyar	31,60	35,10	33,29	100,00
14	Kab. Sragen	34,56	34,88	30,56	100,00
15	Kab. Grobogan	24,44	59,58	15,98	100,00
16	Kab. Blora	29,06	51,39	19,55	100,00
17	Kab. Rembang	33,08	37,18	29,74	100,00
18	Kab. Pati	40,09	31,75	28,15	100,00
19	Kab. Kudus	33,88	13,93	52,19	100,00
20	Kab. Jepara	35,78	20,14	44,08	100,00
21	Kab. Demak	36,84	28,08	35,08	100,00
22	Kab. Semarang	23,32	39,51	37,17	100,00
23	Kab. Temanggung	25,72	47,54	26,73	100,00
24	Kab. Kendal	36,06	37,50	26,44	100,00
25	Kab. Batang	39,27	27,84	32,89	100,00
26	Kab. Pekalongan	37,99	14,20	47,80	100,00
27	Kab. Pemalang	38,48	28,21	33,31	100,00
28	Kab. Tegal	42,82	27,23	29,95	100,00
29	Kab. Brebes	37,82	42,01	20,17	100,00
30	Kota Magelang	38,75	0,61	60,64	100,00
31	Kota Surakarta	37,72	0,00	62,28	100,00
32	Kota Salatiga	51,94	3,01	45,05	100,00
33	Kota Semarang	35,72	2,69	61,59	100,00
34	Kota Pekalongan	45,55	3,39	51,05	100,00
35	Kota Tegal	53,76	8,04	38,19	100,00
Provinsi Jawa Tengah		35,06	33,17	31,76	100,00

Catatan : *) Termasuk pengangguran dan bukan angkatan kerja

Tabel 22
Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas
menurut Kabupaten/Kota dan Sektor Bekerja, September 2014

No	Kabupaten/Kota	Tidak Bekerja *)	Sektor Bekerja		Total
			Bekerja di Sektor Pertanian	Bekerja Bukan di Sektor Pertanian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Cilacap	42,33	27,85	29,82	100,00
2	Kab. Banyumas	40,33	13,92	45,75	100,00
3	Kab. Purbalingga	30,52	22,35	47,13	100,00
4	Kab. Banjarnegara	24,96	47,77	27,28	100,00
5	Kab. Kebumen	35,31	23,39	41,30	100,00
6	Kab. Purworejo	34,25	34,63	31,12	100,00
7	Kab. Wonosobo	29,17	43,39	27,44	100,00
8	Kab. Magelang	23,29	47,24	29,47	100,00
9	Kab. Boyolali	26,88	43,42	29,70	100,00
10	Kab. Klaten	31,43	25,18	43,38	100,00
11	Kab. Sukoharjo	38,14	14,07	47,79	100,00
12	Kab. Wonogiri	28,54	53,63	17,83	100,00
13	Kab. Karanganyar	28,47	38,84	32,69	100,00
14	Kab. Sragen	34,70	31,40	33,91	100,00
15	Kab. Grobogan	28,10	52,42	19,48	100,00
16	Kab. Blora	32,69	50,17	17,14	100,00
17	Kab. Rembang	37,00	34,14	28,85	100,00
18	Kab. Pati	40,04	33,36	26,60	100,00
19	Kab. Kudus	32,17	9,14	58,69	100,00
20	Kab. Jepara	40,10	10,19	49,72	100,00
21	Kab. Demak	43,65	26,83	29,52	100,00
22	Kab. Semarang	28,10	39,23	32,67	100,00
23	Kab. Temanggung	24,85	51,44	23,72	100,00
24	Kab. Kendal	34,44	38,69	26,88	100,00
25	Kab. Batang	35,81	29,13	35,06	100,00
26	Kab. Pekalongan	33,51	19,83	46,66	100,00
27	Kab. Pemalang	46,12	18,42	35,46	100,00
28	Kab. Tegal	46,90	22,22	30,88	100,00
29	Kab. Brebes	34,06	37,09	28,85	100,00
30	Kota Magelang	38,68	2,97	58,35	100,00
31	Kota Surakarta	30,98	0,00	69,02	100,00
32	Kota Salatiga	39,52	9,28	51,19	100,00
33	Kota Semarang	41,01	8,19	50,79	100,00
34	Kota Pekalongan	37,05	12,71	50,24	100,00
35	Kota Tegal	53,08	5,05	41,87	100,00
Provinsi Jawa Tengah		34,73	31,05	34,22	100,00

Catatan : *) Termasuk pengangguran dan bukan angkatan kerja

Tabel 23
Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas
menurut Kabupaten/Kota dan Sektor Bekerja, Maret 2015

No	Kabupaten/Kota	Tidak Bekerja *)	Sektor Bekerja		Total
			Bekerja di Sektor Pertanian	Bekerja Bukan di Sektor Pertanian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Cilacap	42,90	24,69	32,41	100,00
2	Kab. Banyumas	40,78	18,81	40,41	100,00
3	Kab. Purbalingga	34,66	21,80	43,55	100,00
4	Kab. Banjarnegara	27,15	46,16	26,69	100,00
5	Kab. Kebumen	44,66	21,88	33,46	100,00
6	Kab. Purworejo	39,69	29,20	31,10	100,00
7	Kab. Wonosobo	27,35	55,38	17,27	100,00
8	Kab. Magelang	30,22	35,68	34,10	100,00
9	Kab. Boyolali	32,00	43,52	24,48	100,00
10	Kab. Klaten	37,58	25,53	36,89	100,00
11	Kab. Sukoharjo	32,80	10,70	56,50	100,00
12	Kab. Wonogiri	30,22	58,86	10,92	100,00
13	Kab. Karanganyar	34,72	26,44	38,85	100,00
14	Kab. Sragen	37,20	31,58	31,22	100,00
15	Kab. Grobogan	31,79	46,48	21,73	100,00
16	Kab. Blora	33,35	51,79	14,86	100,00
17	Kab. Rembang	36,73	31,57	31,69	100,00
18	Kab. Pati	44,87	25,31	29,82	100,00
19	Kab. Kudus	32,50	7,81	59,70	100,00
20	Kab. Jepara	40,28	13,15	46,56	100,00
21	Kab. Demak	34,01	27,12	38,87	100,00
22	Kab. Semarang	29,01	44,08	26,91	100,00
23	Kab. Temanggung	25,34	52,92	21,75	100,00
24	Kab. Kendal	42,12	24,31	33,56	100,00
25	Kab. Batang	34,85	31,50	33,65	100,00
26	Kab. Pekalongan	37,84	9,82	52,34	100,00
27	Kab. Pemalang	43,54	24,68	31,78	100,00
28	Kab. Tegal	50,09	23,87	26,05	100,00
29	Kab. Brebes	40,86	33,43	25,71	100,00
30	Kota Magelang	38,60	0,00	61,40	100,00
31	Kota Surakarta	29,25	1,09	69,66	100,00
32	Kota Salatiga	39,12	4,13	56,75	100,00
33	Kota Semarang	32,70	3,30	64,01	100,00
34	Kota Pekalongan	38,31	0,00	61,69	100,00
35	Kota Tegal	41,94	6,64	51,42	100,00
Provinsi Jawa Tengah		36,96	29,79	33,25	100,00

Catatan : *) Termasuk pengangguran dan bukan angkatan kerja

Tabel 24
Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas
menurut Kabupaten/Kota dan Sektor Bekerja, Maret 2016

No	Kabupaten/Kota	Tidak Bekerja *)	Sektor Bekerja		Total
			Bekerja di Sektor Pertanian	Bekerja Bukan di Sektor Pertanian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Cilacap	46,66	20,84	32,51	100,00
2	Kab. Banyumas	47,73	9,26	43,02	100,00
3	Kab. Purbalingga	33,94	22,77	43,29	100,00
4	Kab. Banjarnegara	34,65	38,84	26,51	100,00
5	Kab. Kebumen	41,83	24,41	33,76	100,00
6	Kab. Purworejo	35,93	38,54	25,53	100,00
7	Kab. Wonosobo	24,58	57,39	18,04	100,00
8	Kab. Magelang	26,92	49,05	24,02	100,00
9	Kab. Boyolali	24,91	47,25	27,83	100,00
10	Kab. Klaten	39,02	20,08	40,90	100,00
11	Kab. Sukoharjo	47,31	18,19	34,50	100,00
12	Kab. Wonogiri	22,43	54,57	22,99	100,00
13	Kab. Karanganyar	47,38	15,45	37,17	100,00
14	Kab. Sragen	35,60	32,19	32,22	100,00
15	Kab. Grobogan	37,56	42,93	19,51	100,00
16	Kab. Blora	31,98	43,51	24,51	100,00
17	Kab. Rembang	41,13	24,29	34,58	100,00
18	Kab. Pati	45,08	22,70	32,22	100,00
19	Kab. Kudus	46,99	12,75	40,26	100,00
20	Kab. Jepara	35,00	14,72	50,28	100,00
21	Kab. Demak	42,75	25,58	31,67	100,00
22	Kab. Semarang	33,87	33,39	32,75	100,00
23	Kab. Temanggung	23,36	54,66	21,98	100,00
24	Kab. Kendal	37,09	34,24	28,67	100,00
25	Kab. Batang	37,75	37,50	24,75	100,00
26	Kab. Pekalongan	39,92	7,82	52,26	100,00
27	Kab. Pemalang	45,19	20,13	34,68	100,00
28	Kab. Tegal	49,26	19,06	31,68	100,00
29	Kab. Brebes	37,10	35,34	27,56	100,00
30	Kota Magelang	38,27	2,63	59,10	100,00
31	Kota Surakarta	32,65	0,00	67,35	100,00
32	Kota Salatiga	37,69	5,06	57,25	100,00
33	Kota Semarang	42,10	4,44	53,46	100,00
34	Kota Pekalongan	39,05	0,75	60,19	100,00
35	Kota Tegal	41,42	1,24	57,34	100,00
Provinsi Jawa Tengah		38,28	28,56	33,16	100,00

Catatan : *) Termasuk pengangguran dan bukan angkatan kerja

Tabel 25
Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas
menurut Kabupaten/Kota dan Status Bekerja, September 2012

No	Kabupaten/Kota	Tidak Bekerja *)	Status Bekerja		Total
			Bekerja di Sektor Informal	Bekerja di Sektor Formal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Cilacap	39,57	50,71	9,73	100,00
2	Kab. Banyumas	38,61	50,13	11,27	100,00
3	Kab. Purbalingga	31,91	42,00	26,09	100,00
4	Kab. Banjarnegara	27,88	64,89	7,24	100,00
5	Kab. Kebumen	33,53	59,43	7,04	100,00
6	Kab. Purworejo	31,14	61,77	7,09	100,00
7	Kab. Wonosobo	27,95	62,95	9,09	100,00
8	Kab. Magelang	26,07	65,58	8,35	100,00
9	Kab. Boyolali	20,67	61,81	17,52	100,00
10	Kab. Klaten	29,03	51,60	19,37	100,00
11	Kab. Sukoharjo	43,16	33,40	23,44	100,00
12	Kab. Wonogiri	27,38	62,54	10,08	100,00
13	Kab. Karanganyar	27,97	57,82	14,21	100,00
14	Kab. Sragen	30,85	55,81	13,35	100,00
15	Kab. Grobogan	29,83	65,88	4,28	100,00
16	Kab. Blora	33,86	58,59	7,55	100,00
17	Kab. Rembang	32,38	54,69	12,93	100,00
18	Kab. Pati	36,31	57,09	6,60	100,00
19	Kab. Kudus	30,53	31,91	37,56	100,00
20	Kab. Jepara	33,16	32,42	34,41	100,00
21	Kab. Demak	41,55	49,10	9,35	100,00
22	Kab. Semarang	31,81	54,96	13,23	100,00
23	Kab. Temanggung	27,37	61,37	11,25	100,00
24	Kab. Kendal	34,03	49,54	16,44	100,00
25	Kab. Batang	40,49	45,52	13,99	100,00
26	Kab. Pekalongan	32,07	38,39	29,54	100,00
27	Kab. Pemalang	43,37	51,29	5,35	100,00
28	Kab. Tegal	46,31	42,85	10,84	100,00
29	Kab. Brebes	41,87	47,91	10,21	100,00
30	Kota Magelang	43,79	23,88	32,33	100,00
31	Kota Surakarta	33,81	21,42	44,76	100,00
32	Kota Salatiga	44,40	28,86	26,74	100,00
33	Kota Semarang	28,05	29,61	42,34	100,00
34	Kota Pekalongan	32,88	14,11	53,01	100,00
35	Kota Tegal	37,61	30,44	31,94	100,00
Provinsi Jawa Tengah		34,16	52,00	13,84	100,00

Catatan : *) Termasuk pengangguran dan bukan angkatan kerja

Tabel 26
Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas
menurut Kabupaten/Kota dan Status Bekerja, September 2013

No	Kabupaten/Kota	Tidak Bekerja *)	Status Bekerja		Total
			Bekerja di Sektor Informal	Bekerja di Sektor Formal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Cilacap	43,64	47,88	8,48	100,00
2	Kab. Banyumas	38,40	48,86	12,73	100,00
3	Kab. Purbalingga	33,63	47,41	18,96	100,00
4	Kab. Banjarnegara	21,50	74,44	4,06	100,00
5	Kab. Kebumen	43,62	49,56	6,81	100,00
6	Kab. Purworejo	41,77	47,94	10,28	100,00
7	Kab. Wonosobo	26,09	68,64	5,28	100,00
8	Kab. Magelang	30,30	60,37	9,33	100,00
9	Kab. Boyolali	21,96	64,94	13,11	100,00
10	Kab. Klaten	38,23	39,64	22,12	100,00
11	Kab. Sukoharjo	35,90	33,49	30,61	100,00
12	Kab. Wonogiri	34,10	57,57	8,32	100,00
13	Kab. Karanganyar	31,60	52,50	15,90	100,00
14	Kab. Sragen	34,56	50,73	14,71	100,00
15	Kab. Grobogan	24,44	72,80	2,76	100,00
16	Kab. Blora	29,06	60,58	10,36	100,00
17	Kab. Rembang	33,08	53,02	13,90	100,00
18	Kab. Pati	40,09	47,18	12,73	100,00
19	Kab. Kudus	33,88	31,67	34,44	100,00
20	Kab. Jepara	35,78	33,40	30,82	100,00
21	Kab. Demak	36,84	47,02	16,14	100,00
22	Kab. Semarang	23,32	58,84	17,84	100,00
23	Kab. Temanggung	25,72	67,76	6,52	100,00
24	Kab. Kendal	36,06	50,21	13,72	100,00
25	Kab. Batang	39,27	49,99	10,74	100,00
26	Kab. Pekalongan	37,99	34,27	27,73	100,00
27	Kab. Pemalang	38,48	48,93	12,58	100,00
28	Kab. Tegal	42,82	40,23	16,95	100,00
29	Kab. Brebes	37,82	55,18	7,00	100,00
30	Kota Magelang	38,75	23,40	37,85	100,00
31	Kota Surakarta	37,72	24,64	37,64	100,00
32	Kota Salatiga	51,94	27,20	20,85	100,00
33	Kota Semarang	35,72	39,48	24,80	100,00
34	Kota Pekalongan	45,55	12,58	41,87	100,00
35	Kota Tegal	53,76	24,36	21,87	100,00
Provinsi Jawa Tengah		35,06	51,43	13,51	100,00

Catatan : *) Termasuk pengangguran dan bukan angkatan kerja

Tabel 27
Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas
menurut Kabupaten/Kota dan Status Bekerja, September 2014

No	Kabupaten/Kota	Tidak Bekerja *)	Status Bekerja		Total
			Bekerja di Sektor Informal	Bekerja di Sektor Formal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Cilacap	42,33	52,08	5,60	100,00
2	Kab. Banyumas	40,33	47,14	12,53	100,00
3	Kab. Purbalingga	30,52	47,81	21,67	100,00
4	Kab. Banjarnegara	24,96	65,93	9,11	100,00
5	Kab. Kebumen	35,31	52,62	12,06	100,00
6	Kab. Purworejo	34,25	56,79	8,96	100,00
7	Kab. Wonosobo	29,17	58,68	12,15	100,00
8	Kab. Magelang	23,29	68,42	8,29	100,00
9	Kab. Boyolali	26,88	57,67	15,46	100,00
10	Kab. Klaten	31,43	47,01	21,55	100,00
11	Kab. Sukoharjo	38,14	28,47	33,39	100,00
12	Kab. Wonogiri	28,54	66,41	5,04	100,00
13	Kab. Karanganyar	28,47	49,90	21,63	100,00
14	Kab. Sragen	34,70	51,46	13,84	100,00
15	Kab. Grobogan	28,10	65,01	6,88	100,00
16	Kab. Blora	32,69	63,05	4,26	100,00
17	Kab. Rembang	37,00	46,95	16,04	100,00
18	Kab. Pati	40,04	50,44	9,52	100,00
19	Kab. Kudus	32,17	25,51	42,32	100,00
20	Kab. Jepara	40,10	35,96	23,94	100,00
21	Kab. Demak	43,65	42,21	14,14	100,00
22	Kab. Semarang	28,10	57,68	14,22	100,00
23	Kab. Temanggung	24,85	66,16	9,00	100,00
24	Kab. Kendal	34,44	50,80	14,76	100,00
25	Kab. Batang	35,81	50,38	13,80	100,00
26	Kab. Pekalongan	33,51	39,95	26,53	100,00
27	Kab. Pemalang	46,12	41,74	12,14	100,00
28	Kab. Tegal	46,90	35,89	17,21	100,00
29	Kab. Brebes	34,06	55,09	10,85	100,00
30	Kota Magelang	38,68	20,62	40,70	100,00
31	Kota Surakarta	30,98	25,33	43,68	100,00
32	Kota Salatiga	39,52	23,62	36,86	100,00
33	Kota Semarang	41,01	36,64	22,35	100,00
34	Kota Pekalongan	37,05	13,75	49,20	100,00
35	Kota Tegal	53,08	23,88	23,04	100,00
Provinsi Jawa Tengah		34,73	50,73	14,54	100,00

Catatan : *) Termasuk pengangguran dan bukan angkatan kerja

Tabel 28
Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas
menurut Kabupaten/Kota dan Status Bekerja, Maret 2015

No	Kabupaten/Kota	Tidak Bekerja *)	Status Bekerja		Total
			Bekerja di Sektor Informal	Bekerja di Sektor Formal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Cilacap	42,90	44,91	12,19	100,00
2	Kab. Banyumas	40,78	48,25	10,98	100,00
3	Kab. Purbalingga	34,66	45,39	19,95	100,00
4	Kab. Banjarnegara	27,15	64,21	8,64	100,00
5	Kab. Kebumen	44,66	39,73	15,61	100,00
6	Kab. Purworejo	39,69	49,53	10,78	100,00
7	Kab. Wonosobo	27,35	65,64	7,01	100,00
8	Kab. Magelang	30,22	58,66	11,12	100,00
9	Kab. Boyolali	32,00	54,09	13,91	100,00
10	Kab. Klaten	37,58	45,12	17,29	100,00
11	Kab. Sukoharjo	32,80	40,47	26,73	100,00
12	Kab. Wonogiri	30,22	63,31	6,46	100,00
13	Kab. Karanganyar	34,72	41,42	23,87	100,00
14	Kab. Sragen	37,20	51,71	11,08	100,00
15	Kab. Grobogan	31,79	62,79	5,42	100,00
16	Kab. Blora	33,35	58,34	8,30	100,00
17	Kab. Rembang	36,73	47,37	15,89	100,00
18	Kab. Pati	44,87	39,96	15,16	100,00
19	Kab. Kudus	32,50	26,18	41,32	100,00
20	Kab. Jepara	40,28	26,71	33,00	100,00
21	Kab. Demak	34,01	43,15	22,84	100,00
22	Kab. Semarang	29,01	60,16	10,83	100,00
23	Kab. Temanggung	25,34	63,91	10,75	100,00
24	Kab. Kendal	42,12	41,08	16,80	100,00
25	Kab. Batang	34,85	47,13	18,02	100,00
26	Kab. Pekalongan	37,84	30,42	31,74	100,00
27	Kab. Pemalang	43,54	37,19	19,27	100,00
28	Kab. Tegal	50,09	25,76	24,15	100,00
29	Kab. Brebes	40,86	47,74	11,40	100,00
30	Kota Magelang	38,60	23,84	37,56	100,00
31	Kota Surakarta	29,25	31,48	39,26	100,00
32	Kota Salatiga	39,12	18,92	41,95	100,00
33	Kota Semarang	32,70	29,51	37,80	100,00
34	Kota Pekalongan	38,31	13,93	47,75	100,00
35	Kota Tegal	41,94	25,05	33,01	100,00
Provinsi Jawa Tengah		36,96	46,75	16,29	100,00

Catatan : *) Termasuk pengangguran dan bukan angkatan kerja

Tabel 29
Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas
menurut Kabupaten/Kota dan Status Bekerja, Maret 2016

No	Kabupaten/Kota	Tidak Bekerja *)	Status Bekerja		Total
			Bekerja di Sektor Informal	Bekerja di Sektor Formal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Cilacap	46,66	43,88	9,46	100,00
2	Kab. Banyumas	47,73	34,67	17,60	100,00
3	Kab. Purbalingga	33,94	42,41	23,65	100,00
4	Kab. Banjarnegara	34,65	56,69	8,67	100,00
5	Kab. Kebumen	41,83	41,01	17,15	100,00
6	Kab. Purworejo	35,93	53,60	10,47	100,00
7	Kab. Wonosobo	24,58	65,94	9,49	100,00
8	Kab. Magelang	26,92	59,71	13,36	100,00
9	Kab. Boyolali	24,91	55,97	19,11	100,00
10	Kab. Klaten	39,02	33,09	27,89	100,00
11	Kab. Sukoharjo	47,31	30,16	22,53	100,00
12	Kab. Wonogiri	22,43	63,86	13,71	100,00
13	Kab. Karanganyar	47,38	29,69	22,93	100,00
14	Kab. Sragen	35,60	46,17	18,23	100,00
15	Kab. Grobogan	37,56	55,24	7,20	100,00
16	Kab. Blora	31,98	57,58	10,45	100,00
17	Kab. Rembang	41,13	34,94	23,93	100,00
18	Kab. Pati	45,08	41,75	13,18	100,00
19	Kab. Kudus	46,99	28,73	24,27	100,00
20	Kab. Jepara	35,00	23,79	41,21	100,00
21	Kab. Demak	42,75	39,26	17,99	100,00
22	Kab. Semarang	33,87	50,91	15,22	100,00
23	Kab. Temanggung	23,36	69,19	7,45	100,00
24	Kab. Kendal	37,09	44,63	18,28	100,00
25	Kab. Batang	37,75	43,97	18,28	100,00
26	Kab. Pekalongan	39,92	19,77	40,31	100,00
27	Kab. Pemalang	45,19	32,60	22,21	100,00
28	Kab. Tegal	49,26	32,06	18,68	100,00
29	Kab. Brebes	37,10	41,73	21,17	100,00
30	Kota Magelang	38,27	28,97	32,76	100,00
31	Kota Surakarta	32,65	22,14	45,21	100,00
32	Kota Salatiga	37,69	32,70	29,61	100,00
33	Kota Semarang	42,10	17,21	40,70	100,00
34	Kota Pekalongan	39,05	20,22	40,73	100,00
35	Kota Tegal	41,42	29,27	29,32	100,00
Provinsi Jawa Tengah		38,28	42,84	18,88	100,00

Catatan : *) Termasuk pengangguran dan bukan angkatan kerja

Tabel 30
Persentase Pengeluaran per Kapita per Bulan Rumah Tangga Miskin untuk Komoditi Makanan
menurut Kabupaten/Kota, September 2012 - Maret 2016

No	Kabupaten/Kota	September 2012	September 2013	September 2014	Maret 2015	Maret 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kab. Cilacap	64,56	62,87	61,92	61,44	60,56
2	Kab. Banyumas	64,84	62,79	61,89	61,96	59,81
3	Kab. Purbalingga	63,74	66,78	66,10	62,63	60,38
4	Kab. Banjarnegara	62,96	64,73	65,30	65,19	61,09
5	Kab. Kebumen	67,17	65,31	62,67	63,36	63,63
6	Kab. Purworejo	65,93	64,98	63,47	59,97	60,40
7	Kab. Wonosobo	61,99	64,44	64,07	58,11	54,42
8	Kab. Magelang	63,06	65,62	63,77	64,55	61,60
9	Kab. Boyolali	62,43	62,04	61,47	60,24	59,77
10	Kab. Klaten	61,16	63,40	63,34	61,06	58,76
11	Kab. Sukoharjo	62,33	63,14	63,74	56,27	57,73
12	Kab. Wonogiri	62,67	66,25	64,21	62,09	60,27
13	Kab. Karanganyar	61,89	61,51	59,94	59,97	56,97
14	Kab. Sragen	64,43	62,95	60,66	61,88	63,86
15	Kab. Grobogan	67,45	67,30	68,59	67,47	66,50
16	Kab. Blora	67,56	67,28	66,83	65,07	59,87
17	Kab. Rembang	64,47	65,44	62,72	65,46	64,52
18	Kab. Pati	64,79	63,95	64,65	63,80	64,35
19	Kab. Kudus	60,62	62,48	57,73	61,07	57,47
20	Kab. Jepara	62,40	62,86	64,21	63,50	61,22
21	Kab. Demak	65,22	64,60	63,50	61,21	63,05
22	Kab. Semarang	61,55	64,04	64,70	61,92	57,39
23	Kab. Temanggung	60,44	63,28	64,22	58,17	57,67
24	Kab. Kendal	62,95	63,09	63,59	63,03	60,06
25	Kab. Batang	70,67	67,35	65,34	64,56	61,84
26	Kab. Pekalongan	65,23	64,59	64,51	61,06	61,48
27	Kab. Pemalang	66,68	66,87	65,42	65,95	64,54
28	Kab. Tegal	66,07	66,60	68,09	66,29	64,98
29	Kab. Brebes	64,42	66,24	66,34	66,13	64,78
30	Kota Magelang	57,75	57,92	62,66	59,17	56,90
31	Kota Surakarta	52,85	57,71	56,97	54,18	56,21
32	Kota Salatiga	56,60	63,88	61,36	57,55	59,75
33	Kota Semarang	59,25	56,40	57,98	56,91	57,54
34	Kota Pekalongan	66,25	63,59	68,40	61,88	62,11
35	Kota Tegal	55,29	56,77	61,02	54,01	54,95
Provinsi Jawa Tengah		64,10	64,45	63,89	62,68	61,32

Tabel 31
Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Jamban Sendiri/Bersama
menurut Kabupaten/Kota dan Status Miskin, September 2012

No	Kabupaten/Kota	Miskin	Tidak Miskin	Miskin dan Tidak Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Cilacap	69,58	86,60	84,44
2	Kab. Banyumas	49,32	75,22	71,09
3	Kab. Purbalingga	60,60	75,00	72,43
4	Kab. Banjarnegara	29,08	62,32	56,70
5	Kab. Kebumen	65,15	83,02	79,87
6	Kab. Purworejo	52,68	85,24	81,01
7	Kab. Wonosobo	62,78	76,85	74,06
8	Kab. Magelang	69,15	78,82	77,69
9	Kab. Boyolali	72,83	89,45	87,50
10	Kab. Klaten	70,17	84,37	82,51
11	Kab. Sukoharjo	86,16	92,53	92,10
12	Kab. Wonogiri	91,66	92,68	92,57
13	Kab. Karanganyar	85,95	95,58	94,52
14	Kab. Sragen	87,40	92,11	91,43
15	Kab. Grobogan	67,18	89,04	85,75
16	Kab. Blora	66,47	85,94	83,25
17	Kab. Rembang	62,18	72,21	70,36
18	Kab. Pati	77,06	89,50	88,17
19	Kab. Kudus	81,08	92,31	91,59
20	Kab. Jepara	80,82	89,57	88,91
21	Kab. Demak	57,65	80,30	76,98
22	Kab. Semarang	51,20	90,19	87,01
23	Kab. Temanggung	64,10	78,05	76,77
24	Kab. Kendal	56,28	78,38	76,00
25	Kab. Batang	38,39	68,90	66,02
26	Kab. Pekalongan	44,61	69,97	67,29
27	Kab. Pemalang	55,39	72,28	69,93
28	Kab. Tegal	54,14	71,30	69,92
29	Kab. Brebes	52,91	68,59	65,97
30	Kota Magelang	73,02	95,42	93,76
31	Kota Surakarta	69,20	90,82	88,90
32	Kota Salatiga	90,70	98,51	98,02
33	Kota Semarang	95,71	96,18	96,16
34	Kota Pekalongan	70,11	91,75	90,23
35	Kota Tegal	87,91	91,10	90,87
Provinsi Jawa Tengah		63,93	82,89	80,58

Tabel 32
Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Jamban Sendiri/Bersama
menurut Kabupaten/Kota dan Status Miskin, September 2013

No	Kabupaten/Kota	Miskin	Tidak Miskin	Miskin dan Tidak Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Cilacap	78,04	88,44	87,15
2	Kab. Banyumas	59,59	80,24	77,27
3	Kab. Purbalingga	60,86	75,34	73,00
4	Kab. Banjarnegara	41,56	62,68	59,42
5	Kab. Kebumen	69,06	86,15	83,28
6	Kab. Purworejo	71,65	83,64	82,17
7	Kab. Wonosobo	56,51	82,47	77,17
8	Kab. Magelang	59,79	78,34	76,19
9	Kab. Boyolali	76,97	91,36	89,75
10	Kab. Klaten	76,77	89,41	87,68
11	Kab. Sukoharjo	83,66	94,79	93,96
12	Kab. Wonogiri	89,49	96,50	95,67
13	Kab. Karanganyar	88,32	96,59	95,72
14	Kab. Sragen	88,70	95,40	94,56
15	Kab. Grobogan	79,89	88,58	87,31
16	Kab. Blora	87,69	90,26	89,93
17	Kab. Rembang	60,25	83,58	79,28
18	Kab. Pati	77,75	91,44	89,85
19	Kab. Kudus	85,44	95,23	94,57
20	Kab. Jepara	75,31	94,02	92,53
21	Kab. Demak	66,80	84,59	82,39
22	Kab. Semarang	64,37	91,47	89,76
23	Kab. Temanggung	75,42	81,12	80,57
24	Kab. Kendal	56,27	79,08	76,52
25	Kab. Batang	52,56	70,27	68,44
26	Kab. Pekalongan	45,83	74,63	71,79
27	Kab. Pemalang	65,77	81,26	78,90
28	Kab. Tegal	64,34	77,46	76,39
29	Kab. Brebes	62,04	67,36	66,47
30	Kota Magelang	88,08	94,33	93,86
31	Kota Surakarta	61,34	89,55	87,28
32	Kota Salatiga	100,00	98,13	98,20
33	Kota Semarang	94,99	97,78	97,68
34	Kota Pekalongan	87,12	95,39	94,98
35	Kota Tegal	86,97	92,66	92,29
Provinsi Jawa Tengah		69,61	85,62	83,73

Tabel 33
Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Jamban Sendiri/Bersama
menurut Kabupaten/Kota dan Status Miskin, September 2014

No	Kabupaten/Kota	Miskin	Tidak Miskin	Miskin dan Tidak Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Cilacap	77,19	88,18	86,87
2	Kab. Banyumas	61,51	80,40	77,72
3	Kab. Purbalingga	55,95	76,11	72,71
4	Kab. Banjarnegara	60,19	69,90	68,46
5	Kab. Kebumen	77,57	84,32	83,26
6	Kab. Purworejo	71,83	84,35	82,80
7	Kab. Wonosobo	55,59	82,01	76,57
8	Kab. Magelang	66,26	81,55	80,05
9	Kab. Boyolali	84,85	92,89	92,00
10	Kab. Klaten	81,93	90,34	89,29
11	Kab. Sukoharjo	80,14	95,86	94,86
12	Kab. Wonogiri	94,78	96,98	96,73
13	Kab. Karanganyar	89,05	96,37	95,63
14	Kab. Sragen	87,76	96,18	95,19
15	Kab. Grobogan	78,94	89,88	88,51
16	Kab. Blora	78,20	90,98	89,50
17	Kab. Rembang	68,16	79,38	77,47
18	Kab. Pati	82,71	93,34	92,20
19	Kab. Kudus	85,83	95,10	94,54
20	Kab. Jepara	83,86	93,01	92,32
21	Kab. Demak	62,93	88,19	85,19
22	Kab. Semarang	75,51	93,11	91,96
23	Kab. Temanggung	66,26	85,83	83,89
24	Kab. Kendal	57,49	83,49	80,78
25	Kab. Batang	60,53	80,45	78,55
26	Kab. Pekalongan	53,40	71,54	69,80
27	Kab. Pemalang	65,01	79,00	76,93
28	Kab. Tegal	62,55	77,70	76,54
29	Kab. Brebes	56,54	74,01	71,17
30	Kota Magelang	83,98	96,85	95,93
31	Kota Surakarta	65,92	89,57	87,65
32	Kota Salatiga	85,75	98,22	97,72
33	Kota Semarang	90,55	97,94	97,64
34	Kota Pekalongan	69,29	95,26	93,91
35	Kota Tegal	88,55	90,19	90,10
Provinsi Jawa Tengah		71,06	86,88	85,10

Tabel 34
Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Jamban Sendiri/Bersama
menurut Kabupaten/Kota dan Status Miskin, Maret 2015

No	Kabupaten/Kota	Miskin	Tidak Miskin	Miskin dan Tidak Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Cilacap	79,36	85,76	84,94
2	Kab. Banyumas	56,23	78,16	75,05
3	Kab. Purbalingga	64,96	80,91	78,14
4	Kab. Banjarnegara	45,39	77,56	72,17
5	Kab. Kebumen	81,01	88,60	87,29
6	Kab. Purworejo	76,60	89,07	87,53
7	Kab. Wonosobo	80,85	88,59	87,68
8	Kab. Magelang	70,46	84,43	82,95
9	Kab. Boyolali	80,25	94,10	92,52
10	Kab. Klaten	88,25	93,84	93,06
11	Kab. Sukoharjo	85,82	95,77	95,01
12	Kab. Wonogiri	94,94	98,96	98,50
13	Kab. Karanganyar	93,42	98,00	97,47
14	Kab. Sragen	91,19	97,35	96,54
15	Kab. Grobogan	88,41	93,73	93,06
16	Kab. Blora	80,22	89,82	88,52
17	Kab. Rembang	75,04	89,14	86,49
18	Kab. Pati	88,64	93,91	93,37
19	Kab. Kudus	87,72	96,42	95,83
20	Kab. Jepara	91,44	95,25	94,91
21	Kab. Demak	75,83	93,09	90,61
22	Kab. Semarang	82,63	93,65	92,79
23	Kab. Temanggung	75,80	88,78	87,47
24	Kab. Kendal	55,96	86,76	83,65
25	Kab. Batang	62,90	83,81	81,65
26	Kab. Pekalongan	61,91	81,20	79,27
27	Kab. Pemalang	50,40	78,75	73,95
28	Kab. Tegal	72,63	85,60	84,49
29	Kab. Brebes	55,52	76,64	72,91
30	Kota Magelang	83,04	94,00	93,17
31	Kota Surakarta	71,41	92,29	90,33
32	Kota Salatiga	80,16	98,24	97,40
33	Kota Semarang	92,21	96,67	96,47
34	Kota Pekalongan	64,14	91,36	89,80
35	Kota Tegal	85,93	95,61	94,97
Provinsi Jawa Tengah		74,29	89,25	87,43

Tabel 35
Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Jamban Sendiri/Bersama
menurut Kabupaten/Kota dan Status Miskin, Maret 2016

No	Kabupaten/Kota	Miskin	Tidak Miskin	Miskin dan Tidak Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Cilacap	80,73	87,74	86,97
2	Kab. Banyumas	67,41	89,20	86,09
3	Kab. Purbalingga	71,32	85,76	83,32
4	Kab. Banjarnegara	53,47	74,67	71,45
5	Kab. Kebumen	82,34	93,73	91,87
6	Kab. Purworejo	81,65	88,44	87,59
7	Kab. Wonosobo	61,44	82,61	78,52
8	Kab. Magelang	69,34	87,22	85,20
9	Kab. Boyolali	84,68	94,98	93,79
10	Kab. Klaten	96,30	93,11	93,50
11	Kab. Sukoharjo	88,76	96,21	95,64
12	Kab. Wonogiri	90,19	98,64	97,64
13	Kab. Karanganyar	92,55	97,10	96,63
14	Kab. Sragen	90,30	96,24	95,46
15	Kab. Grobogan	84,47	91,83	90,89
16	Kab. Blora	87,35	94,08	93,24
17	Kab. Rembang	76,82	86,58	84,86
18	Kab. Pati	88,22	94,15	93,53
19	Kab. Kudus	86,56	96,36	95,65
20	Kab. Jepara	92,67	90,91	91,04
21	Kab. Demak	70,63	87,48	85,27
22	Kab. Semarang	74,82	92,20	90,94
23	Kab. Temanggung	73,51	88,21	86,67
24	Kab. Kendal	67,82	86,57	84,58
25	Kab. Batang	53,75	81,10	78,34
26	Kab. Pekalongan	77,51	82,70	82,16
27	Kab. Pemasang	64,04	83,65	80,63
28	Kab. Tegal	71,52	87,64	86,31
29	Kab. Brebes	61,35	76,64	74,19
30	Kota Magelang	78,66	95,14	94,05
31	Kota Surakarta	72,16	89,63	88,25
32	Kota Salatiga	98,00	98,33	98,38
33	Kota Semarang	97,95	95,96	96,04
34	Kota Pekalongan	85,27	89,35	89,11
35	Kota Tegal	90,94	96,67	96,28
Provinsi Jawa Tengah		76,65	89,69	88,18

Tabel 36
Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Kabupaten/Kota
dan Luas Lantai Perkapita, September 2012

No	Kabupaten/Kota	Luas Lantai Perkapita (m ²)		
		≤ 8	8 < luas ≤ 15	> 15
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Cilacap	6,91	55,01	38,08
2	Kab. Banyumas	10,43	50,41	39,16
3	Kab. Purbalingga	12,50	47,80	39,70
4	Kab. Banjarnegara	7,01	41,90	51,09
5	Kab. Kebumen	13,69	39,87	46,44
6	Kab. Purworejo	3,82	41,16	55,02
7	Kab. Wonosobo	10,46	40,10	49,43
8	Kab. Magelang	7,20	31,53	61,27
9	Kab. Boyolali	6,49	15,62	77,90
10	Kab. Klaten	6,09	29,16	64,76
11	Kab. Sukoharjo	12,51	29,81	57,68
12	Kab. Wonogiri	3,67	23,43	72,90
13	Kab. Karanganyar	2,69	25,89	71,42
14	Kab. Sragen	2,36	12,62	85,01
15	Kab. Grobogan	1,67	11,81	86,52
16	Kab. Blora	3,79	12,72	83,50
17	Kab. Rembang	4,59	33,99	61,42
18	Kab. Pati	12,11	32,26	55,63
19	Kab. Kudus	19,43	46,49	34,07
20	Kab. Jepara	11,41	46,98	41,62
21	Kab. Demak	10,74	46,93	42,33
22	Kab. Semarang	6,58	16,79	76,63
23	Kab. Temanggung	10,77	47,74	41,48
24	Kab. Kendal	9,72	40,23	50,05
25	Kab. Batang	14,30	51,53	34,17
26	Kab. Pekalongan	15,36	66,05	18,59
27	Kab. Pemalang	26,68	54,84	18,48
28	Kab. Tegal	9,60	51,00	39,40
29	Kab. Brebes	18,47	51,13	30,39
30	Kota Magelang	39,76	44,93	15,31
31	Kota Surakarta	56,92	18,56	24,52
32	Kota Salatiga	12,10	48,97	38,93
33	Kota Semarang	31,43	40,60	27,97
34	Kota Pekalongan	12,01	48,42	39,57
35	Kota Tegal	33,20	49,84	16,97
Provinsi Jawa Tengah		10,91	38,21	50,88

Tabel 37
Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Kabupaten/Kota
dan Luas Lantai Perkapita, September 2013

No	Kabupaten/Kota	Luas Lantai Perkapita (m ²)		
		≤ 8	8 < luas ≤ 15	> 15
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Cilacap	10,60	41,84	47,56
2	Kab. Banyumas	8,63	50,76	40,61
3	Kab. Purbalingga	8,30	52,32	39,38
4	Kab. Banjarnegara	4,63	36,37	58,99
5	Kab. Kebumen	12,07	39,58	48,35
6	Kab. Purworejo	8,87	33,10	58,03
7	Kab. Wonosobo	10,38	40,41	49,20
8	Kab. Magelang	9,76	32,80	57,45
9	Kab. Boyolali	3,68	11,86	84,46
10	Kab. Klaten	5,11	30,99	63,90
11	Kab. Sukoharjo	19,22	23,32	57,46
12	Kab. Wonogiri	2,39	10,54	87,08
13	Kab. Karanganyar	9,28	27,72	63,01
14	Kab. Sragen	2,55	16,21	81,24
15	Kab. Grobogan	2,21	4,26	93,54
16	Kab. Blora	0,81	9,88	89,31
17	Kab. Rembang	5,28	27,63	67,09
18	Kab. Pati	4,59	35,65	59,76
19	Kab. Kudus	19,78	42,99	37,23
20	Kab. Jepara	10,82	36,58	52,61
21	Kab. Demak	9,83	46,86	43,31
22	Kab. Semarang	4,80	21,64	73,55
23	Kab. Temanggung	4,69	38,84	56,47
24	Kab. Kendal	3,74	51,61	44,65
25	Kab. Batang	9,17	40,02	50,82
26	Kab. Pekalongan	14,63	62,31	23,05
27	Kab. Pemalang	13,42	63,81	22,78
28	Kab. Tegal	12,19	43,49	44,32
29	Kab. Brebes	10,58	50,82	38,60
30	Kota Magelang	33,98	53,18	12,84
31	Kota Surakarta	54,77	25,58	19,65
32	Kota Salatiga	43,81	35,78	20,41
33	Kota Semarang	58,25	20,27	21,47
34	Kota Pekalongan	25,31	41,16	33,53
35	Kota Tegal	34,63	34,94	30,42
Provinsi Jawa Tengah		9,73	36,02	54,25

Tabel 38
Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Kabupaten/Kota
dan Luas Lantai Perkapita, September 2014

No	Kabupaten/Kota	Luas Lantai Perkapita (m ²)		
		≤ 8	8 < luas ≤ 15	> 15
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Cilacap	10,86	41,99	47,15
2	Kab. Banyumas	5,95	53,56	40,49
3	Kab. Purbalingga	10,24	46,77	42,99
4	Kab. Banjarnegara	4,96	46,22	48,82
5	Kab. Kebumen	4,02	49,36	46,62
6	Kab. Purworejo	2,90	36,06	61,04
7	Kab. Wonosobo	9,65	40,13	50,22
8	Kab. Magelang	15,40	28,68	55,92
9	Kab. Boyolali	1,26	20,44	78,30
10	Kab. Klaten	4,63	34,85	60,52
11	Kab. Sukoharjo	19,40	32,40	48,20
12	Kab. Wonogiri	1,17	14,24	84,59
13	Kab. Karanganyar	5,89	34,58	59,53
14	Kab. Sragen	1,96	14,23	83,81
15	Kab. Grobogan	1,23	5,43	93,34
16	Kab. Blora	0,00	19,74	80,26
17	Kab. Rembang	5,00	24,45	70,55
18	Kab. Pati	5,34	35,83	58,84
19	Kab. Kudus	17,01	52,09	30,90
20	Kab. Jepara	10,25	35,19	54,56
21	Kab. Demak	8,11	46,98	44,90
22	Kab. Semarang	2,17	27,77	70,06
23	Kab. Temanggung	7,38	30,77	61,85
24	Kab. Kendal	3,09	35,54	61,37
25	Kab. Batang	3,97	53,39	42,64
26	Kab. Pekalongan	17,83	57,55	24,61
27	Kab. Pemalang	17,59	58,12	24,29
28	Kab. Tegal	13,27	41,65	45,08
29	Kab. Brebes	17,61	46,30	36,09
30	Kota Magelang	46,39	29,35	24,26
31	Kota Surakarta	44,04	28,23	27,73
32	Kota Salatiga	10,00	52,48	37,52
33	Kota Semarang	41,55	31,32	27,13
34	Kota Pekalongan	31,28	50,43	18,28
35	Kota Tegal	32,90	34,15	32,95
Provinsi Jawa Tengah		9,31	37,48	53,20

Tabel 39
Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Kabupaten/Kota
dan Luas Lantai Perkapita, Maret 2015

No	Kabupaten/Kota	Luas Lantai Perkapita (m ²)		
		≤ 8	8 < luas ≤ 15	> 15
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Cilacap	8,48	45,94	45,58
2	Kab. Banyumas	3,44	41,85	54,71
3	Kab. Purbalingga	7,82	38,30	53,88
4	Kab. Banjarnegara	6,02	40,98	53,00
5	Kab. Kebumen	6,11	42,91	50,98
6	Kab. Purworejo	8,48	38,02	53,50
7	Kab. Wonosobo	9,78	33,98	56,24
8	Kab. Magelang	24,25	26,77	48,98
9	Kab. Boyolali	1,35	14,73	83,92
10	Kab. Klaten	4,37	26,55	69,08
11	Kab. Sukoharjo	13,13	22,87	64,01
12	Kab. Wonogiri	0,99	12,71	86,30
13	Kab. Karanganyar	3,88	19,31	76,80
14	Kab. Sragen	5,06	16,40	78,54
15	Kab. Grobogan	4,58	8,71	86,71
16	Kab. Blora	1,01	7,62	91,37
17	Kab. Rembang	4,34	22,58	73,08
18	Kab. Pati	2,06	46,39	51,55
19	Kab. Kudus	9,68	47,19	43,13
20	Kab. Jepara	7,09	31,83	61,08
21	Kab. Demak	7,65	43,35	49,00
22	Kab. Semarang	2,79	18,52	78,69
23	Kab. Temanggung	12,66	38,11	49,23
24	Kab. Kendal	4,81	39,37	55,81
25	Kab. Batang	6,81	45,25	47,95
26	Kab. Pekalongan	15,94	44,19	39,88
27	Kab. Pemalang	11,42	46,21	42,37
28	Kab. Tegal	11,87	38,51	49,62
29	Kab. Brebes	7,97	44,60	47,43
30	Kota Magelang	13,86	29,91	56,22
31	Kota Surakarta	36,41	27,88	35,71
32	Kota Salatiga	28,81	41,56	29,63
33	Kota Semarang	22,77	26,48	50,75
34	Kota Pekalongan	33,48	30,79	35,73
35	Kota Tegal	16,42	26,81	56,78
Provinsi Jawa Tengah		7,97	33,39	58,64

Tabel 40
Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Kabupaten/Kota
dan Luas Lantai Perkapita, Maret 2016

No	Kabupaten/Kota	Luas Lantai Perkapita (m ²)		
		≤ 8	8 < luas ≤ 15	> 15
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Cilacap	13,49	45,19	41,32
2	Kab. Banyumas	7,30	40,36	52,35
3	Kab. Purbalingga	6,74	37,53	55,73
4	Kab. Banjarnegara	9,99	34,51	55,50
5	Kab. Kebumen	7,17	44,39	48,44
6	Kab. Purworejo	6,17	35,93	57,91
7	Kab. Wonosobo	6,61	43,35	50,04
8	Kab. Magelang	10,33	36,34	53,33
9	Kab. Boyolali	3,00	18,38	78,62
10	Kab. Klaten	2,93	17,09	79,98
11	Kab. Sukoharjo	10,00	21,60	68,40
12	Kab. Wonogiri	0,00	19,08	80,92
13	Kab. Karanganyar	1,09	33,56	65,35
14	Kab. Sragen	0,82	15,89	83,28
15	Kab. Grobogan	3,44	17,20	79,36
16	Kab. Blora	2,39	12,09	85,53
17	Kab. Rembang	6,45	28,73	64,83
18	Kab. Pati	7,21	45,91	46,88
19	Kab. Kudus	12,39	38,44	49,18
20	Kab. Jepara	1,57	47,56	50,87
21	Kab. Demak	7,64	35,82	56,55
22	Kab. Semarang	2,87	35,94	61,19
23	Kab. Temanggung	6,85	40,72	52,43
24	Kab. Kendal	5,30	27,30	67,40
25	Kab. Batang	5,16	28,77	66,07
26	Kab. Pekalongan	17,64	44,12	38,24
27	Kab. Pemasang	18,77	39,75	41,48
28	Kab. Tegal	3,81	40,01	56,18
29	Kab. Brebes	12,75	39,76	47,49
30	Kota Magelang	36,08	23,71	40,21
31	Kota Surakarta	70,74	15,79	13,47
32	Kota Salatiga	39,94	35,82	24,24
33	Kota Semarang	31,63	38,12	30,25
34	Kota Pekalongan	31,14	46,72	22,15
35	Kota Tegal	36,78	34,88	28,34
Provinsi Jawa Tengah		8,80	33,77	57,42

Tabel 41
Persentase Rumah Tangga Miskin yang Pernah Membeli Beras Raskin,
Rata-Rata Jumlah Beras Raskin, dan Rata-rata Harga Pembelian Raskin
menurut Kabupaten/Kota, Maret 2016

No	Kabupaten/Kota	Rumah Tangga Penerima Raskin (%)	Rata-Rata Raskin (kg)	Rata-Rata Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Cilacap	80,54	7,82	1 805
2	Kab. Banyumas	91,01	5,57	2 060
3	Kab. Purbalingga	94,31	5,64	1 936
4	Kab. Banjarnegara	71,19	6,86	2 137
5	Kab. Kebumen	89,27	6,30	1 855
6	Kab. Purworejo	75,54	5,89	1 875
7	Kab. Wonosobo	92,19	5,54	2 332
8	Kab. Magelang	86,75	5,07	2 199
9	Kab. Boyolali	63,95	7,52	1 893
10	Kab. Klaten	88,31	5,68	1 828
11	Kab. Sukoharjo	67,13	8,59	1 649
12	Kab. Wonogiri	80,13	8,26	1 812
13	Kab. Karanganyar	68,77	9,86	1 766
14	Kab. Sragen	55,94	10,38	1 640
15	Kab. Grobogan	81,48	5,68	1 845
16	Kab. Blora	96,89	4,07	1 916
17	Kab. Rembang	95,81	6,50	1 693
18	Kab. Pati	94,24	4,50	1 938
19	Kab. Kudus	83,74	3,72	1 950
20	Kab. Jepara	92,05	5,81	2 008
21	Kab. Demak	94,40	4,32	2 074
22	Kab. Semarang	72,71	7,07	1 814
23	Kab. Temanggung	88,36	6,61	2 217
24	Kab. Kendal	49,64	11,63	1 818
25	Kab. Batang	87,39	5,32	2 127
26	Kab. Pekalongan	87,57	4,71	1 897
27	Kab. Pemalang	99,01	5,83	1 910
28	Kab. Tegal	91,00	5,40	1 998
29	Kab. Brebes	90,45	5,62	1 991
30	Kota Magelang	58,47	6,23	1 890
31	Kota Surakarta	65,95	12,77	1 720
32	Kota Salatiga	79,26	7,68	1 999
33	Kota Semarang	68,97	6,23	2 115
34	Kota Pekalongan	41,22	8,61	1 812
35	Kota Tegal	65,46	7,87	1 879
Provinsi Jawa Tengah		83,80	6,17	1 947

CATATAN TEKNIS

1. Metodologi Penghitungan Kemiskinan

1.1. Konsep

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM), yang diperoleh dari hasil Susenas.

1.2. Sumber Data

a. Tahun 2012 - 2014

Sumber data yang digunakan untuk menghitung kemiskinan di tingkat kabupaten/kota adalah data Susenas Modul Konsumsi Triwulan I, II, III dan IV. Sedangkan khusus untuk tahun 2014 data yang digunakan adalah Susenas Modul Konsumsi Triwulan I, II, III (tahun 2014) dan Triwulan IV tahun 2013. Keempat set data (Susenas triwulan I, II, III dan IV) dilakukan penggabungan sehingga jumlah sampel sekitar 300.000 rumah tangga. Data Susenas gabungan tersebut dipergunakan untuk estimasi kemiskinan tingkat kabupaten/kota.

Data Susenas modul konsumsi gabungan diolah menjadi data yang mewakili kondisi bulan September (triwulan III). Pengolahan dilakukan dengan melakukan normalisasi nilai pengeluaran konsumsi ke kondisi bulan September. Normalisasi dengan melakukan inflate/deflate (inflasi implisit) terhadap nilai pengeluaran konsumsi yang dibedakan konsumsi makanan dan bukan makanan. Tahapan normalisasi sebagai berikut :

- 1) Menentukan nilai rata-rata pengeluaran perkapita/bulan menurut basket dan non basket tiap ruta :

$$w_{ki} = \frac{1}{n_{ki}} \sum v_{jki}$$

dimana :

w_{ki} = rata-rata pengeluaran perkapita kelompok komoditi k di ruta i

n_{ki} = banyaknya jenis komoditi, kelompok komoditi k yang dikonsumsi oleh ruta i

- v_{jki} = pengeluaran perkapita komoditi j di kelompok komoditi k yang dikonsumsi oleh rumah tangga i
 k = kelompok komoditi (basket dan non basket)
 i = rumahtangga i
 j = komoditi j

- 2) Menentukan nilai rata-rata pengeluaran perkapita menurut triwulan, provinsi, daerah kota-
desa dan kelompok komoditi :

$$x_{kpdt} = \frac{1}{m_{pdt}} \sum w_{kpdr}$$

dimana:

- x_{kpdt} = rata-rata pengeluaran perkapita kelompok komoditi k di provinsi p daerah d triwulan t
 m_{pdt} = banyaknya rumah tangga di provinsi p daerah d triwulan t
 w_{kpdr} = pengeluaran perkapita ruta r untuk kelompok komoditi k di provinsi p daerah d triwulan t
 k = kelompok komoditi (basket dan non basket)
 r = rumah tangga r

- 3) Menentukan faktor koreksi (*inflasi implicit*) terhadap triwulan 3 menurut provinsi, daerah kota-
desa, dan basket komoditi :

$$inf_{kpdt} = \frac{x_{kpdt}}{x_{kpd3}}$$

di mana:

- inf_{kpdt} = faktor inflasi implisit kelompok k di provinsi p daerah d triwulan t
 x_{kpdt} = rata-rata pengeluaran perkapita kelompok komoditi k di provinsi p daerah d triwulan t
 x_{kpd3} = rata-rata pengeluaran perkapita kelompok komoditi k di provinsi p daerah d triwulan 3

- 4) *Inflate/deflate* pengeluaran konsumsi (kondisi September) tiap komoditi menurut provinsi, kota-
desa, dan kelompok komoditi dan periode :

$$v'_{jikpdt} = v_{jikpdt} \times inf_{kpdt}$$

di mana:

- v_{jikpdt} = nilai pengeluaran perkapita komoditi j di ruta i
 v'_{jikpdt} = nilai penyesuaian pengeluaran perkapita komoditi j di ruta i

Keterangan :

- ruta = rumah tangga

b. Tahun 2015-2016

Sumber data yang digunakan untuk menghitung kemiskinan di tingkat kabupaten/kota adalah data Susenas Konsumsi Pengeluaran Maret 2015 dan Maret 2016. Penimbang yang digunakan menggunakan hasil proyeksi penduduk dari data Sensus Penduduk 2010.

1.3. Metode

Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM), secara formula adalah sebagai berikut :

$$GK = GKM + GKNM$$

Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).

Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.

1.3.1. Teknik Penghitungan Garis Kemiskinan Tingkat Provinsi

Tahap pertama adalah menentukan kelompok referensi (*reference population*) yaitu 20 persen penduduk yang berada di atas Garis Kemiskinan Sementara (GKS). Kelompok referensi ini didefinisikan sebagai penduduk kelas marjinal. GKS dihitung berdasarkan GK periode sebelumnya yang di-*inflate* dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).

Garis kemiskinan makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut. Formula dasar dalam menghitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah :

$$GKM_j = \sum_{k=1}^{52} P_{jk} \cdot Q_{jk} = \sum_{k=1}^{52} V_{jk}$$

Keterangan :

- GKM_j = Garis Kemiskinan Makanan daerah j (sebelum disetarakan menjadi 2.100 kilokalori)
 P_{jk} = Harga komoditi k di daerah j
 Q_{jk} = Rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j
 V_{jk} = Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j
 j = Daerah (perkotaan atau perdesaaan)

Selanjutnya GKM_j tersebut disetarakan dengan 2.100 kilokalori dengan mengalikan 2.100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah j dari penduduk referensi, sehingga :

$$\overline{HK}_j = \frac{\sum_{k=1}^{52} V_{jk}}{\sum_{k=1}^{52} K_{jk}}$$

Keterangan :

- K_{jk} = Kalori dari komoditi k di daerah j
 \overline{HK}_j = Harga rata-rata kalori di daerah j

$$F_j = \overline{HK}_j \times 2100$$

Keterangan :

- F_j = Kebutuhan minimum makanan di daerah j, yaitu yang menghasilkan energi setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari

Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Pemilihan jenis barang dan jasa non makanan mengalami perkembangan dan penyempurnaan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan perubahan pola konsumsi penduduk. Pada periode sebelum tahun 1993 terdiri dari 14 komoditi di perkotaan dan 12 komoditi di perdesaan. Sejak tahun 1998 terdiri dari 27 sub kelompok (51 jenis komoditi) di perkotaan dan 25 sub kelompok (47 jenis komoditi) di perdesaan.

Nilai kebutuhan minimum per komoditi/sub-kelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok tersebut terhadap total

pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar 2004 (SPKKD 2004), yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non makanan yang lebih rinci dibandingkan data Susenas modul konsumsi. Nilai kebutuhan minimum non makanan secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$NF_p = \sum_{i=1}^n r_i \times V_i$$

Keterangan :

- NF_p = Pengeluaran minimum non makanan atau garis kemiskinan non makanan daerah p ($GKNM_p$)
- V_i = Nilai pengeluaran per komoditi/sub-kelompok non-makanan i di daerah p (dari Susenas Modul Konsumsi)
- r_i = Rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok non-makanan i menurut daerah (hasil SPKKD 2004)
- i = Jenis komoditi non makanan terpilih di daerah p
- p = Daerah (perkotaan atau perdesasaan)

Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non-Makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

1.3.2. Teknik Penghitungan Garis Kemiskinan Tingkat Kabupaten/Kota

- 1) Dalam menghitung GK pada level kabupaten/kota tidak dapat dilakukan seperti pada penghitungan kemiskinan di provinsi. Hal ini disebabkan oleh:
 - a. Keterbatasan jumlah sampel untuk populasi refensi di level kabupaten/kota.
 - b. Estimasi di tingkat kabupaten/kota tidak dapat dibedakan berdasarkan perkotaan dan perdesaan.
- 2) Pendekatan dalam menghitung kemiskinan kabupaten/kota adalah sebagai berikut:
 - a. Menentukan Garis Kemiskinan Sementara (GKS) untuk tingkat Kabupaten/Kota dengan cara:

$$GKS_{ij}^t = GK_{ij}^{t-1} \times (1 + (E_j \times I_{ij}))$$

- GKS_{ij}^t = Garis kemiskinan sementara kabupaten/kota ke- i di provinsi ke- j di tahun t
- GK_{ij}^{t-1} = Garis kemiskinan kabupaten/kota ke- i di provinsi ke- j di tahun $t-1$

- E_j = Elastisitas provinsi ke- j (rasio antara pertumbuhan garis kemiskinan provinsi ke- j terhadap inflasi provinsi ke- j)
- I_{ij} = Inflasi kabupaten/kota ke- i di provinsi ke- j

Catatan:

- Untuk mencari GKS pada tingkat kabupaten ke- i digunakan elastisitas provinsi ke- j di level perdesaan
 - Untuk mencari GKS pada tingkat kota ke- i digunakan elastisitas provinsi ke- j di level perkotaan
 - Untuk kabupaten/kota yang bukan kota inflasi, laju inflasinya diperoleh dari kabupaten/kota yang berdekatan (pendekatan *sister city*).
- b. Menentukan PO sementara kabupaten/kota ke- i di provinsi ke- j yaitu dengan cara mengalikan pertumbuhan PO provinsi ke- j periode t ke $t-1$ dengan PO kabupaten ke- i pada tahun $t-1$.
 - c. Menetapkan Garis Kemiskinan dengan cara menarik titik potong antara GKS dan PO sementara.
 - d. Menghitung indikator kemiskinan dengan menggunakan formulasi FGT.
 - e. Melakukan prorata jumlah penduduk miskin kabupaten/kota agar sama dengan angka provinai yang telah dirilis sebelumnya.

1.4. Indikator Kemiskinan

Head Count Index (HCI - P_0) yaitu persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index P_1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index P_2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Foster-Greer-Thorbecke/FGT (1984) telah merumuskan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan yaitu :

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Keterangan:

α = 0, 1, 2

z = garis kemiskinan

y_i = rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$

q = banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

n = jumlah penduduk

Jika $\alpha = 0$ maka diperoleh *Head Count Index* (P_0); jika $\alpha = 1$ diperoleh Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index* P_1) dan $\alpha = 2$ adalah Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index* P_2).

1.5. Beberapa Konsep dan Definisi

2.3.1. Pendidikan

- a. **Pendidikan yang ditamatkan** adalah proporsi seluruh kepala rumah tangga berumur 15 tahun ke atas menurut ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki. Publikasi ini mengelompokkan ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki menjadi tiga, yaitu tidak mempunyai ijazah, mempunyai ijazah SD atau SLTP dan mempunyai ijazah minimal SLTA khusus untuk kepala rumah tangga miskin.
- b. **Angka Melek Huruf (AMH)** adalah proporsi seluruh penduduk miskin berumur 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis kata-kata/kalimat sederhana dalam aksara tertentu. Publikasi ini hanya menyajikan angka melek huruf penduduk miskin menurut kelompok umur 15 – 24 tahun dan 15 – 55 tahun. Melek huruf yang dimaksudkan di sini adalah melek huruf latin, atau huruf arab, atau huruf lainnya.
- c. **Angka Partisipasi Sekolah (APS)** adalah proporsi dari seluruh penduduk miskin menurut berbagai kelompok umur tertentu (misalnya: 7-12 tahun, 13-15 tahun, 16-18 tahun, dan 19-24 tahun) yang masih duduk di bangku sekolah. Publikasi ini hanya menyajikan angka partisipasi sekolah penduduk miskin pada kelompok umur 7 – 12 tahun dan 13 – 15 tahun yang dapat digunakan untuk melihat indikasi umum dari pelaksanaan Program Wajib Belajar 9 tahun.

1.5.1. Ketenagakerjaan

- a. **Bekerja** adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama 1 jam secara terus menerus dalam seminggu yang lalu. Penduduk yang dicatat untuk publikasi ini khusus penduduk miskin berumur 15 tahun ke atas.
- b. **Bekerja di sektor informal** adalah proporsi penduduk miskin berumur 15 tahun ke atas yang mempunyai status/kedudukan dalam pekerjaan utama adalah berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, atau pekerja keluarga/tidak dibayar.
- c. **Bekerja di sektor formal** adalah proporsi penduduk miskin berumur 15 tahun ke atas yang mempunyai status/kedudukan dalam pekerjaan utama adalah berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar atau buruh/karyawan/pegawai.
- d. **Bekerja di sektor pertanian** adalah proporsi penduduk miskin berumur 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor pertanian tanaman padi dan palawija, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan dan pertanian lainnya.
- e. **Bekerja bukan di sektor pertanian** adalah proporsi penduduk miskin berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selain di sektor pertanian.
- f. Kategori "**Tidak bekerja**" dalam publikasi ini termasuk pengangguran dan penduduk bukan angkatan kerja.

1.5.2. Pengeluaran Perkapita

Persentase pengeluaran per kapita untuk makanan adalah proporsi pengeluaran perkapita/bulan untuk makanan dibagi dengan pengeluaran perkapita/bulan total (untuk makanan dan non makanan).

1.5.3. Fasilitas Perumahan

- a. **Rumah tangga pengguna jamban sendiri/bersama** adalah persentase rumah tangga yang menggunakan fasilitas tempat pembuangan air besar yang digunakan oleh rumah tangga itu sendiri atau bersama dengan rumah tangga tertentu.
- b. **Luas lantai per kapita** adalah luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari (sebatas atap). Bagian-bagian yang digunakan bukan untuk keperluan sehari-hari tidak dimasukkan dalam perhitungan luas lantai seperti lumbung padi, kandang ternak, lantai jemur (hamparan semen) dan ruangan khusus untuk usaha (misalnya warung). Untuk bangunan bertingkat, luas lantai adalah jumlah luas dari semua tingkat yang ditempati. Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa sebuah rumah dikategorikan sebagai rumah sehat apabila luas lantai per kapita yang ditempati minimal sebesar 8 m². Sedangkan *World Health Organisation* (WHO) dan *American Public Health Association* (APHA) mensyaratkan luas lantai per kapita minimal 10 m². Kategori luas lantai per kapita yang

digunakan dalam publikasi ini adalah kurang dari atau sama dengan 8 m², 9m² sampai 15 m², dan lebih dari 15 m².

1.5.4. Program Pemerintah

Raskin / Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin) adalah salah satu program pemerintah untuk rakyat miskin yang diselenggarakan oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) yaitu menjual beras dengan harga murah bersubsidi.

1.5.5. Inflasi

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi penting yang dapat memberikan informasi mengenai perkembangan harga barang dan jasa yang dibayar oleh konsumen atau masyarakat, khususnya masyarakat perkotaan. IHK mengukur perubahan pengeluaran/biaya barang dan jasa (paket komoditi) yang biasa dibeli oleh mayoritas rumah tangga dari waktu ke waktu. Dengan kualitas dan kuantitas paket komoditas yang dianggap konstan pada tahun dasar, indeks tersebut semata-mata mencerminkan perubahan harga dan didesain sebagai suatu ukuran dari dampak perubahan harga pada pembelian barang dan jasa. **Inflasi** dihitung dengan menggunakan metode "*point to point*" yaitu dengan membandingkan IHK dari periode sebelumnya.



DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl. Pahlawan No. 6 Semarang 50241

Telp. 024 - 8412802, 8412804, 8412805 Fax. 024 - 8311195

Homepage: <http://jateng.bps.go.id> E-mail : bps3300@bps.go.id

ISSN 2407-3369



9 772407 336006